

**DESAIN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN RUMAH
SAKIT BERSTATUS BLUD (Studi Kasus pada Rumah Sakit Jiwa Menur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur)**

Disusun Oleh :

Nanda Dwi Firdausi

NIM. 145020301111030

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Derajat Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**DESAIN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN
RUMAH SAKIT BERSTATUS BLUD (STUDI KASUS PADA RUMAH
SAKIT JIWA MENUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR)**

Yang disusun oleh:

Nama : Nanda Dwi Firdausi

NIM : 145020301111030

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk digunakan dalam ujian skripsi.

Malang, 08 Agustus 2018
Dosen Pembimbing,



Yuki Firmanto, MSA., Ak.

NIP. 2011068506121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**DESAIN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN
RUMAH SAKIT BERSTATUS BLUD (STUDI KASUS PADA RUMAH
SAKIT JIWA MENUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR)**

Yang disusun oleh :

Nama : Nanda Dwi Firdausi

NIM : 145020301111030

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

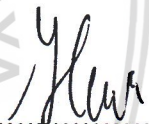
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Agustus 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Yuki Firmanto, MSA., Ak.

NIP. 2011068506121001

(Dosen Pembimbing)

.....


2. Dra. Grace Widijoko, MSA., Ak.

NIP. 195805111983032002


(Dosen Penguji 1)

.....


3. Devy Pusposari, MSi., Ak.

NIP. 197511052003122001

(Dosen Penguji 2)

.....


Malang, 2 September 2018

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Dra. Endang Mardiaty, MSi., Ak.

NIP. 195909021986012001

.....


SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Dwi Firdausi

NIM : 145020301111030

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**DESAIN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN
RUMAH SAKIT BERSTATUS BLUD (STUDI KASUS PADA RUMAH
SAKIT JIWA MENUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR)**

adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 9 Agustus 2018
Pembuat Pernyataan,



Nanda Dwi Firdausi
NIM.145020301111030

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanda Dwi Firdausi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 21 Maret 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. R. A. Kartini RT 07 RW 02 Kel. Latek, Bangil
Alamat Malang : Jl. Kertosentono no. 20 Lowokwaru, Malang
Alamat Email : nandasukono@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

Sekolah/Universitas	Jurusan	Tahun
SD Negeri Dermo 1 Bangil	-	2002-2008
SMP Negeri 1 Bangil	-	2008-2011
SMA Negeri 1 Bangil	IPS	2011-2014
Universitas Brawijaya	Akuntansi	2014-2018

Pengalaman Kepanitiaan dan Organisasi:

- *Inbox Economic of English (ICOSH)* sebagai Sekretaris Departemen *Talent Management* pada Tahun 2015.
- Panitia Bina Desa Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Divisi Hubungan Masyarakat dan Dana di Desa Torongrejo Kabupaten Malang pada Bulan Mei-Desember 2015.

Pengalaman Seminar dan Workshop:

- Seminar Syariah “*Dinar-Dirham and Fiat Money, which the Best*” yang diselenggarakan oleh Center for Islamic Economic Studies (CIES), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya pada 4 Desember 2014.
- Seminar Nasional “Mahasiswa Mandiri” yang diselenggarakan Institute Surplus Indonesia di Universitas Brawijaya pada 15 Maret 2015.

- Peserta Bedah Buku *Branding* Kantor Akuntan dan Pelatihan Penulisan Buku Terapan *Gathering* Akuntan Se-Malang Raya yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya bekerja sama dengan IAI Komisariat Malang Raya pada 3 Mei 2016.
- Seminar *Brawijaya Accounting Update Series* “Reformasi Tata Kelola Pajak di Indonesia Pasca *Tax Amnesty*” yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya bekerja sama dengan IAI Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya pada 15 November 2016.
- *Workshop* Audit Tahun Ajaran 2017-2018 yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Prestasi:

- Juara 1 Lomba Karya Inovatif dan Produktif (LKIP) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya pada Tahun 2014.
- Finalis Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Mahasiswa Baru (Maba) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya pada Tahun 2015.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“DESAIN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN RUMAH SAKIT BERSTATUS BLUD (Studi Kasus pada RSJ Menur Pemerintah Provinsi Jawa Timur)”**. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai. Adapun ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Sukono Mulyanto dan Ibu Dwi Susilowati serta kakak Firdaus Putra Perdana yang tiada henti memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Yuki Firmanto, MSA., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, MSi., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Bapak Helmy Adam, SE., MSA., Ak. yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, dan berbagi ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Bapak/Ibu di RSJ Menur Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersedia membantu memberikan informasi selama proses penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Ibu Dra. Grace Widijoko, MSA., Ak selaku dosen penguji 1 dan Ibu Devy Pusposari, MSi., Ak. selaku dosen penguji 2 yang telah banyak membantu memberikan kritik dan saran agar skripsi ini untuk menjadi lebih baik.
7. Para Sahabat, Nabila, Peggy, Renny, Oktaf, Heidi, Masita, Lili, Dini, Uyun, Vina, Elisha, Nensi, Fanda, Novi, Sella, Indhira, Marizya, dan Zyarina yang telah membuat dunia perkuliahan menjadi lebih berwarna dan selalu memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kak Kukuh, Kak Yudhan, dan Hasna yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berbagi ilmu.
9. Para sahabat semasa SMA, Iis, Nila, dan Mia yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperbimbingan, Frizka, Vindy, dan Lutfi yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 31 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Rumah Sakit.....	10
2.2. Laporan Keuangan.....	12
2.2.1. Definisi Laporan Keuangan	12
2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan	12
2.2.3. Komponen Laporan Keuangan	13
2.2.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	14
2.3. Laporan Keuangan pada BLUD.....	16
2.4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan	18
2.4.1. Aset.....	18
2.4.2. Liabilitas/Kewajiban.....	19

2.4.3. Ekuitas	20
2.4.4. Pendapatan.....	20
2.4.5. Beban	21
2.5. Hubungan SAK ETAP dan PSAK 45	21
2.6. Kebijakan Akuntansi pada Laporan Keuangan	22
2.6.1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	22
2.6.2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	23
2.6.3. Pengungkapan Unsur Laporan Keuangan	25
2.6.4. Penyajian Laporan Keuangan	25
2.7. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	26
2.8. Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45	32
BAB III: METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.1. Data Primer.	37
3.2.2. Data Sekunder.	38
3.3. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV: PEMBAHASAN.	42
4.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Menur.	42
4.1.1. Sejarah Rumah Sakit Jiwa Menur	42
4.1.2. Lokasi Rumah Sakit Jiwa Menur.....	44
4.1.3. Status Kepemilikan Rumah Sakit Jiwa Menur	44
4.1.4. Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Menur	45
4.2. Laporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Menur Saat Ini.	47
4.3. Kebijakan Akuntansi yang Digunakan RSJ Menur Saat Ini	48
4.3.1 Kebijakan Aset Pergub Jatim nomor 2 tahun 2017	51
4.3.1.1 Aset Lancar	51
4.3.1.2 Aset Tetap	55
4.3.1.3 Aset Tidak Berwujud	58

4.3.1.4	Aset Lain-lain.....	59
4.3.1.5	Akumulasi Penyusutan Aset	59
4.3.2	Kebijakan Kewajiban Pergub Jatim nomor 2 tahun 2017	60
4.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek.....	60
4.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	63
4.3.3	Kebijakan Ekuitas Pergub Jatim nomor 2 tahun 2017	63
4.3.4	Kebijakan Pendapatan Pergub Jatim nomor 2 tahun 2017	63
4.3.5	Kebijakan Beban Pergub Jatim nomor 2 tahun 2017	64
4.3.5.1	Beban Pegawai	64
4.3.5.2	Beban Barang dan Jasa.....	65
4.3.5.3	Beban Penyisihan Piutang.....	66
4.3.5.4	Beban Penyusutan	66
4.4	Perbandingan Desain Laporan Keuangan pada Pergub Jatim nomor 2 tahun 2017 dengan Kebijakan Baru.....	67
4.4.1	Neraca	67
4.4.2	Laporan Operasional.....	69
4.4.3	Laporan Perubahan Ekuitas	70
4.4.4	Laporan Arus Kas	71
4.5	Perbandingan Kebijakan Akuntansi pada Pergub Jatim nomor 2 tahun 2017 dengan Kebijakan Baru	74
4.5.1	Aset	74
4.5.1.1	Aset Lancar	74
4.5.1.2	Aset Tetap	82
4.5.1.3	Aset Tidak Berwujud	89
4.5.1.4	Aset Lain-lain.....	91
4.5.1.5	Akumulasi Penyusutan Aset	92
4.5.1.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	93
4.5.2	Kewajiban	93
4.5.2.1	Kewajiban Jangka Pendek.....	93
4.5.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	94
4.5.3	Ekuitas	95

4.5.4	Pendapatan.....	96
4.5.5	Beban	99
4.5.5.1	Beban Pegawai	99
4.5.5.2	Beban Barang dan Jasa.....	100
4.5.5.3	Beban Penyisihan Piutang.....	101
4.5.5.4	Beban Penyusutan	102
4.5.5.5	Beban Kerugian Penurunan/Kehilangan/Penghapusan Persediaan	103
4.5.5.6	Beban Kerugian Penurunan/Kehilangan/Penghapusan Aset Tetap.....	103
4.6	Desain Laporan Keuangan RSJ Menur Berdasarkan SAK	104
4.6.1.	Neraca	104
4.6.2.	Laporan Operasional.....	105
4.6.3.	Laporan Perubahan Ekuitas	107
4.6.4.	Laporan Arus Kas.....	109
4.7	Kebijakan Akuntansi SAK RSJ Menur	112
4.7.1.	Aset.....	112
4.7.1.1	Aset Lancar	112
4.7.1.2	Aset Tetap	118
4.7.1.3	Aset Tidak Berwujud	120
4.7.1.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	121
4.7.2.	Kewajiban/Utang	122
4.7.2.1	Utang Jangka Pendek	122
4.7.2.2	Pendapatan Diterima Dimuka	125
4.7.3.	Ekuitas	125
4.7.4.	Pendapatan.....	126
4.7.4.1	.Pendapatan Operasional BLUD dari Pelayanan Kesehatan dan Penyesuaian Pendapatan Klaim.....	127
4.7.4.2	Pendapatan Operasional Hibah.....	129
4.7.4.3	Pendapatan dari Instansi Pemerintah Vertikal.....	130
4.7.4.4	Pendapatan dari Keuntungan Aset.....	130

4.7.5	Beban	130
4.7.5.1	Beban Operasional dari Kegiatan Pelayanan.....	131
4.7.5.2	Beban Operasional dari Kegiatan Umum dan Administrasi	132
4.7.5.3	Beban Non Operasional.....	135
BAB V: PENUTUP		138
5.1	Kesimpulan.....	138
5.2	Keterbatasan Penelitian	143
5.3	Saran	144
DAFTAR PUSTAKA		146



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Rumah Sakit di Jawa Timur Tahun 2016.	2
Tabel 2.1. Informasi yang Disajikan dalam Neraca.	28
Tabel 2.2. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi.	30
Tabel 2.3. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Arus Kas.	30
Tabel 2.4. Klasifikasi Akun pada Laporan Posisi Keuangan.....	34
Tabel 2.5. Klasifikasi Pengaruh Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian pada Akun Aset Neto/Ekuitas dalam Laporan Aktivitas.....	35
Tabel 4.1. Format Desain Neraca Menurut Pergub Jatim No. 2 Tahun 2017.....	67
Tabel 4.2. Format Desain Laporan Operasional Menurut Pergub Jatim No. 2 Tahun 2017.....	69
Tabel 4.3. Format Desain Laporan Arus Kas Menurut Pergub Jatim No, 2 tahun 2017	71
Tabel 4.4. Klasifikasi Aset Lancar	74
Tabel 4.5. Format Desain Neraca RSJ Menur	104
Tabel 4.6. Pos-pos pada Laporan Operasional dan Laporan Laba Rugi RSJ Menur	106
Tabel 4.7. Format Desain Laporan Operasional RSJ Menur.....	106
Tabel 4.8. Format Desain Laporan Perubahan Ekuitas RSJ Menur	109
Tabel 4.9 Format Desain Laporan Arus Kas RSJ Menur	110
Tabel 4.10 Rincian Jenis Pendapatan Operasional dari Pelayanan Kesehatan.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Prosedur Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD ke Pemerintah Daerah.....	17
Gambar 4.1	Struktur Organisasi RSJ Menur.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Akun RSJ Menur.	149
Lampiran 2. Jurnal Akuntansi	158



ABSTRAK**DESAIN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN
RUMAH SAKIT BERSTATUS BLUD (STUDI KASUS PADA RUMAH
SAKIT JIWA MENUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR)****Oleh:****Nanda Dwi Firdausi****Dosen Pembimbing: Yuki Firmanto, MSA., Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan pada suatu entitas pelaporan rumah sakit berstatus BLUD, serta membuat desain laporan keuangannya berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Objek penelitian ini adalah RSJ Menur Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, RSJ Menur menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 sebagai acuan kebijakan akuntansi yang masih berbasis SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Desain laporan keuangan yang peneliti rekomendasikan dengan kebijakan akuntansi yang merujuk pada SAK ETAP menghasilkan beberapa perbedaan dengan laporan keuangan yang kebijakan akuntansinya mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, BLUD, SAK

ABSTRACT**FINANCIAL STATEMENT DESIGN OF REPORTING ENTITIES OF
HOSPITALS WITH BLUD STATUS (A CASE STUDY OF THE MENUR
MENTAL HOSPITAL OF THE EAST JAVA PROVINCIAL
GOVERNMENT)****By:****Nanda Dwi Firdausi****Supervisor: Yuki Firmanto, MSA., Ak.**

The aim this research is to find out the accountancy principle that is referred to by the reporting entity of hospital with BLUD (Regional Public Service Agency) status that designs financial statements based on SAK (Standar Akuntansi Keuangan) or Financial Affairs Accountancy Standard. The object of this research is the Menur Mental Hospital of the East Java Provincial Government. This research used the qualitative method with a case study approach. Research data were collected by interviews, observation, and documentation. The research findings indicated that the Menur Mental Hospital uses East Java Government Regulation Number 2 of Year 2017 as the accountancy principle reference which is still based on SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) or Government Accountancy Standard. The financial statement design that is suggested by researcher with the accountancy principle referring to SAK ETAP leads to several differences with the financial statements for which the accountancy principle refers to East Java Government Regulation Number 2 of Year 2017.

Keyword: Financial Statements, BLUD, SAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan unit pelayanan yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan. Sebagai unit pelayanan yang memiliki tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit juga dituntut agar menyediakan layanan kesehatan secara produktif serta memprioritaskan kesembuhan dan proses pemulihan dengan prosedur yang sesuai, akurat, dan terstruktur. Di Indonesia, rumah sakit dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan pihak yang mendirikan. Adapun rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan swasta. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah merupakan rumah sakit yang harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas pada bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usaha dibatasi dalam bidang perumahsakit. Demi mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit diklasifikasikan menjadi dua jenis atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, antara lain rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan atas semua bidang penyakit. Sedangkan, pada rumah sakit khusus hanya memberikan pelayanan kesehatan satu jenis penyakit atau tertentu saja sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni rumah

sakit bersangkutan. Di Provinsi Jawa Timur, rumah sakit tersebar dengan jenis klasifikasi umum dan khusus seperti yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Rumah Sakit di Jawa Timur Tahun 2016

Jenis	Rumah Sakit Publik					Rumah Sakit Privat	
	Kemenkes	Pemda	TNI/ POLRI	Kement -rian Lain	Swasta Non Profit	Swasta	BUMN
Umum	0	58	29	2	88	86	11
Khusus	1	9	3	0	30	58	2
Jumlah	1	67	32	2	118	144	13
Total	377						

Sumber Data: Kementerian Kesehatan Indonesia, 2016

Persebaran rumah sakit di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tabel di atas, menunjukkan jumlah total keseluruhan rumah sakit baik rumah sakit umum maupun khusus sebesar 377 rumah sakit. Adapun dari masing-masing jenis rumah sakit umum dan khusus dibedakan menjadi rumah sakit yang dibawah Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Kementerian Lain, Swasta Non Profit, Swasta, dan BUMN.

Rumah sakit dengan status sebagai BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah yang berada di bawah kepemilikan Pemerintah Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat demi memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai prinsip ekonomi dan produktivitas juga implementasi praktek bisnis sehat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam PP No. 23 tahun 2005. Sebagai entitas pelaporan, rumah sakit memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan yang

ditujukan baik bagi pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan yang disusun rumah sakit akan digunakan oleh pihak internal selaku pihak yang mengatur manajemen rumah sakit dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kondisi keuangan yang sedang terjadi. Sedangkan, pihak eksternal menggunakan laporan keuangan sebagai media dalam memantau pertanggungjawaban rumah sakit dalam menggunakan sumber daya yang diberikan.

Laporan keuangan BLUD disusun dengan menggunakan dua pendekatan standar yaitu berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Atas adanya penggunaan dua pendekatan standar tersebut, maka wajib bagi BLUD untuk melakukan konsolidasi atas laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilakukan setiap semester dan tahun. Penyusunan laporan keuangan dengan dasar SAP menggunakan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat BLUD sebagai acuannya. Sedangkan untuk pendekatan berbasis SAK, BLUD menggunakan kebijakan akuntansi internal yang dibuat oleh pihak BLUD itu sendiri. Kebijakan akuntansi internal yang dimaksud adalah kebijakan akuntansi yang disusun oleh pihak yang memiliki peran dalam akuntansi pada BLUD bersangkutan. Kebijakan akuntansi internal BLUD disusun dengan acuan standar yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dengan persetujuan Menteri Keuangan. BLUD dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi internal selain didasarkan pada SAK, namun juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada BLUD, artinya suatu BLUD diberikan keleluasaan dalam menerapkan pola pengelolaan keuangannya dengan kebijakan akuntansi

internal yang disesuaikan dengan kondisinya asalkan masih dalam konteks praktek bisnis yang sehat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah berupa pengelolaan keuangan yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adanya kebijakan akuntansi diharapkan dapat membuat entitas BLUD lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan sehingga upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai. Namun, hal demikian masih belum dapat dikatakan maksimal pada entitas-entitas BLUD di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2016) yang menganalisis kesiapan RSUD untuk menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan BLUD). Dari penelitian tersebut, disebutkan bahwa terjadi kendala pada saat RSUD akan menerapkan PPK-BLUD dari segi keterbatasan pengembangan infrastruktur serta jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang sesuai standar sehingga perlu adanya peningkatan agar memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Nurputri (2016) melakukan penelitian dengan menganalisis kesiapan internal rumah sakit menuju pola pengelolaan keuangan BLU pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Hasil dari penelitian menyebutkan jika pada bagian karyawan rumah sakit belum siap sepenuhnya

terutama bagian keuangan untuk menjadi PPK-BLUD. Dalam penelitian disebutkan juga bawa rumah sakit bersangkutan masih belum dikatakan memuaskan dalam penerapan PPK-BLUD dengan masukan agar rumah sakit untuk segera melengkapi persyaratan administratif yang belum terpenuhi seperti kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dan tata kelola serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya di bidang keuangan dan administrasi.

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya yang harus mulai diterapkan di tahun 2015. Kusuma (2013) melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah masih sangat rendah. Tingkat penerapan akuntansi akrual secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala yang sering terjadi pada BLUD dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah dari segi sumber daya manusia yang menjadi pemicu utamanya, dimana masih kurangnya pemahaman dari sumber daya manusia terhadap akuntansi akrual. Kurangnya pemahaman terhadap akuntansi akrual menyebabkan terhambatnya BLUD dalam upaya menghasilkan informasi

keuangan yang material, dan sebaliknya informasi keuangan yang dihasilkan menjadi tidak informatif, tidak akurat, dan menyesatkan.

Salah satu rumah sakit berstatus BLUD di Provinsi Jawa Timur adalah RSJ Menur yang menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di RSJ Menur dengan klasifikasi sebagai rumah sakit khusus kelas A di Provinsi Jawa Timur. RSJ Menur telah memperoleh status sebagai BLUD sejak tahun 2008, namun dalam penyusunan laporan keuangan masih menggunakan basis SAP sampai tahun 2014. RSJ Menur mulai menyusun laporan keuangan dengan basis SAK pada tahun 2015. Sehingga, dapat dikatakan jika RSJ Menur masih dalam tahap merintis penyusunan laporan keuangan berbasis SAK. Dengan demikian, maka diharapkan bagi RSJ Menur untuk terus mengalami perkembangan yang baik dalam merintis SAK agar penyusunan laporan keuangan dapat mencapai target kualitatif seperti yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005, antara lain yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan entitas lain, serta dapat dipahami oleh penggunaannya. Penelitian ini berfokus pada kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai pedoman rumah sakit untuk menyusun laporan keuangan yang berbasis SAK. Kebijakan akuntansi akan memuat unsur-unsur seperti prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan yang disesuaikan dengan jenis dan kondisi entitas BLUD bersangkutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul:

“DESAIN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN RUMAH SAKIT BERSTATUS BLUD (Studi Kasus pada Rumah Sakit Jiwa Menur Pemerintah Provinsi Jawa Timur)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan pelaporan RSJ Menur saat ini?
2. Bagaimana desain laporan keuangan RSJ Menur yang disusun berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis SAK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan bagi pelaporan RSJ Menur saat ini.
2. Untuk membuat desain laporan keuangan RSJ Menur berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis SAK.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bentuk tindakan dalam upaya menambah wawasan terkait akuntansi keuangan untuk entitas BLUD khususnya di bidang perumahsakitan.
2. Sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keuangan dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh peneliti dengan

menerapkannya pada praktek penyusunan laporan keuangan pada entitas BLUD khususnya di bidang perumahsakitan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, hasil penelitian dari ini dapat menjadi media informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek yang lebih luas khususnya bidang akuntansi keuangan.
2. Bagi RSJ Menur, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan rumah sakit yang berstatus BLUD untuk disusun menggunakan kebijakan akuntansi berbasis SAK untuk tahun anggaran selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang relevan sebagai dasar peneliti melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

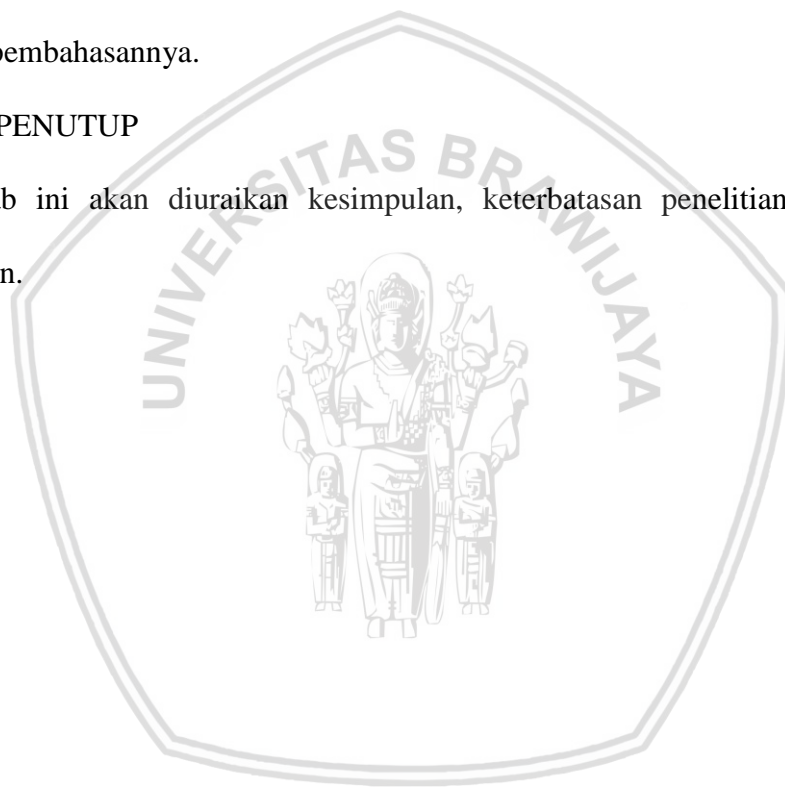
Pada bab ini menguraikan prosedur penelitian yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai upaya mencari jawaban atas topik yang diteliti sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil yang didapatkan dari dilakukannya penelitian beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman organisasi rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 menyatakan rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit yang dikelola pemerintah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Rumah sakit privat merupakan rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Adapun berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah sakit khusus yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam upaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Jenjang rumah sakit diurutkan dari kelas A sampai D atas dasar dari tersedianya pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, serta bangunan dan prasarana yang memadai. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan klasifikasi rumah sakit umum dan khusus adalah sebagai berikut:

1. Rumah sakit umum:
 - a. Rumah sakit umum kelas A
 - b. Rumah sakit umum kelas B
 - c. Rumah sakit umum kelas C
 - d. Rumah sakit umum kelas D dan kelas D pratama
2. Rumah sakit khusus:
 - a. Rumah sakit khusus kelas A
 - b. Rumah sakit khusus kelas B
 - c. Rumah sakit khusus kelas C

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut (Halim dan Kusufi, 2013). Menurut Weygandt dkk. (2007:2) laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan atau entitas sebagai sarana pengomunikasikan dengan pihak internal maupun eksternal.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Martani dkk. (2014:9) pada bukunya Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK menyebutkan bahwa secara umum tujuan laporan keuangan untuk:

1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
4. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.

PSAP 01 (2005:5) mengungkapkan jika laporan keuangan disusun dengan tujuan umum yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya. Lalu, secara khusus tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Weygandt dkk. (2007:29) mengatakan terdapat empat laporan keuangan yang dibuat dari data akuntansi yang telah diringkas, diantaranya adalah:

1. Laporan laba rugi (*income statement*) menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan selama suatu periode waktu tertentu.

2. Laporan ekuitas pemilik (*owner's equity statement*) merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu.
3. Neraca (*balance sheet*) melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flows*) merangkum seluruh informasi mengenai arus kas masuk (penerimaan-penerimaan) dan arus kas keluar (pembayaran-pembayaran) untuk periode waktu tertentu.

Penyajian laporan keuangan menurut PSAK 01 (2009:06) secara lengkap meliputi enam komponen diantaranya adalah:

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan arus kas.
5. Kebijakan akuntansi beserta catatan atas laporan keuangan.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Martani dkk. (2014:37) menyebutkan karakteristik kualitatif pokok pada laporan keuangan terdiri dari empat karakteristik, antara lain:

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

2. Relevan

Informasi yang tersaji di laporan keuangan harus memiliki kegunaan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi keuangan, umumnya digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari informasi yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Sebagai pemakai laporan keuangan, perlu membandingkan laporan keuangan entitas antarperiode dan membandingkannya dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antarperiode dan dengan entitas lain, maka pengukuran dan

penyajian transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antarperiode dan konsisten dengan entitas lain. Selain itu, pemakai laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

2.3 Laporan Keuangan pada BLUD

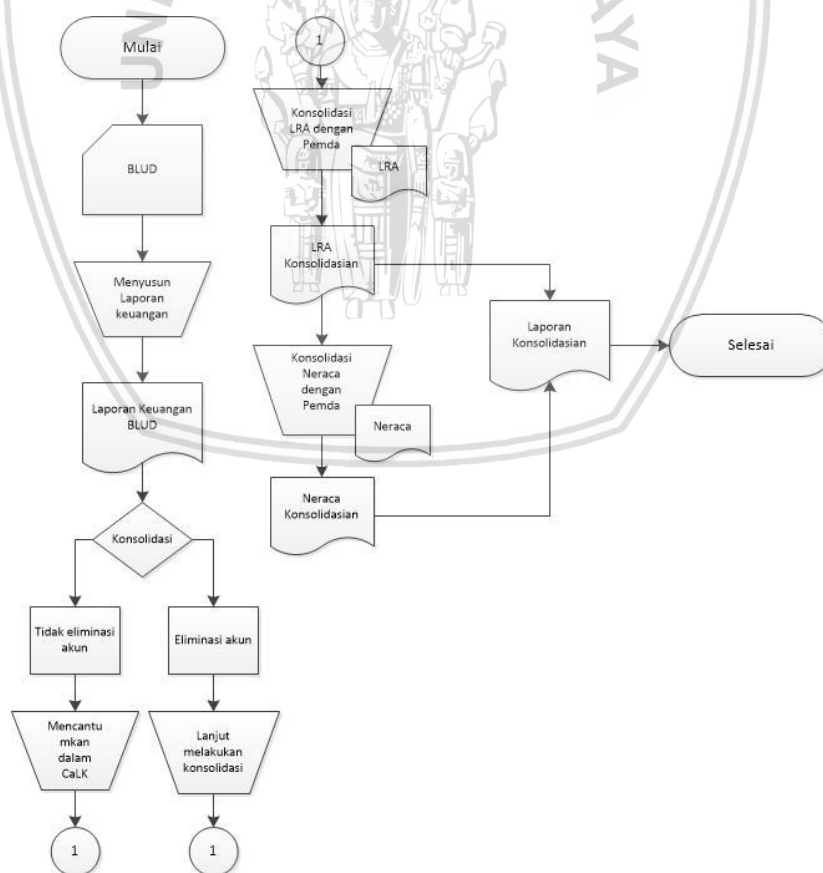
Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum mendefinisikan Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sedangkan untuk definisi BLUD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007, pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang

dimaksud yaitu keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. Dalam praktek penyusunan laporan keuangan BLUD, terdapat dua pendekatan yang digunakan sebagai acuan antara lain penggunaan pendekatan berbasis SAP dan SAK. Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan dua pendekatan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan berbasis SAP dengan dilengkapi laporan keuangan berbasis SAK yang ditujukan untuk kepentingan konsolidasi setiap semester dan tahun kepada pemerintah daerah setempat.

Gambar 2.1

Prosedur Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD ke Pemerintah Daerah



Sumber: PSAP 11 (2005)

Laporan keuangan BLUD paling sedikit meliputi:

1. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan operasional

Berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode.

3. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

2.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

2.4.1 Aset

Pengertian aset menurut Weygandt dkk. (2007:16) merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas, seperti produksi, konsumsi dan jual beli. Definisi aset menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya milik suatu entitas yang memberikan manfaat ekonomi ketika digunakan.

Aset pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Menurut Purba (2013:2) aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang. Ross dkk. (2015:24) mengatakan bahwa aset tidak lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun.

2.4.2 Liabilitas/Kewajiban

Arti liabilitas menurut Weygandt dkk. (2007:16) yaitu klaim terhadap aset sehingga merupakan utang dan keharusan yang mesti dipenuhi. Liabilitas atau dalam hal lain disebut kewajiban dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sehingga, liabilitas pada konteks BLUD adalah utang atau kewajiban dari peristiwa masa lalu yang dalam penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD bersangkutan.

Sama halnya dengan aset yang memiliki dua jenis golongan antara lain aset lancar dan aset tidak lancar, begitu juga dengan liabilitas. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Martani dkk.

(2014:141) mengungkapkan bahwa kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang didasarkan pada kondisi yang ada pada tanggal akhir periode pelaporan. Liabilitas jangka pendek akan memiliki jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal akhir periode. Sebaliknya, liabilitas jangka panjang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal akhir periode.

2.4.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan hasil dari total aset yang telah dikurangi dengan total liabilitas entitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2015 mendefinisikan ekuitas atau dalam lingkup pemerintahan dikenal sebagai ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dapat disimpulkan, ekuitas pada BLUD merupakan hak residual milik BLUD bersangkutan setelah dikurangi total aset dengan total kewajiban yang dimiliki.

2.4.4 Pendapatan

Martani dkk. (2014:114) mendefinisikan pendapatan atau penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto (ekuitas), dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas, yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Weygandt dkk. (2007:16) pendapatan adalah peningkatan kotor ekuitas seorang pemilik yang berasal dari aktivitas bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Definisi pendapatan jika ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2008 tentang pedoman akuntansi dan

pelaporan keuangan BLU, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

2.4.5 Beban

Weygandt dkk. (2007:16) beban merupakan biaya atas aktiva yang dikonsumsi, atau jasa yang digunakan dalam proses mendapatkan laba. Biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

2.5 Hubungan SAK ETAP dan PSAK 45

Dalam mengimplementasikan SAK ETAP (2009) selaku standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, sebetulnya tidak lepas dari adanya peran PSAK 45. Dalam PSAK 45 (revisi 2011) paragraf 3 menyatakan bahwa pernyataan yang tidak diatur pada PSAK 45, akan mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Sehingga dapat dikatakan jika PSAK 45 dan SAK ETAP memiliki hubungan yang berkesinambungan seperti yang tercantum pada Buletin Teknis nomor 6 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2011 sebagai berikut:

“Untuk hal-hal yang tidak teratur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 27, entitas nirlaba yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 45. Acuan pada SAK non-ETAP tidak hanya terbatas untuk kedua PSAK tersebut.”

2.6 Kebijakan Akuntansi pada Laporan Keuangan

Definisi kebijakan akuntansi menurut Juan dan Wahyuni (2014:141) adalah serangkaian prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik spesifik yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

2.6.1 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Martani dkk. (2014:45) mendefinisikan pengakuan (*recognition*) merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan neraca atau laporan laba rugi komprehensif. Pos yang dinyatakan memenuhi sebagai definisi unsur laporan keuangan apabila:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

3. Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

2.6.2 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Menurut Martani dkk. (2014:47) pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Terdapat empat dasar metode pengukuran, antara lain:

1. Biaya historis (*historical cost*) adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi.
2. Biaya kini (*current cost*) adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran.

3. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*) adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal.
4. Nilai kini (*present value*) adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

SAK ETAP mengartikan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang digunakan dalam SAK ETAP terdiri dari dua metode pengukuran yaitu biaya historis dan nilai wajar. Adapun pengukuran biaya historis dan nilai wajar di SAK ETAP adalah sebagai berikut:

1. Biaya historis

Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

2. Nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.6.3 Pengungkapan Unsur Laporan Keuangan

Hal-hal yang perlu diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP meliputi:

1. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantor yang terdaftar.
2. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

Pengungkapan tambahan jika diperlukan antara lain:

1. Kepatuhan terhadap SAK ETAP jika laporan keuangan mematuhi secara penuh semua persyaratan SAK ETAP.
2. Kelangsungan usaha dengan menilai kemampuan entitas melanjutkan usaha.
3. Pengungkapan jika terjadi perubahan frekuensi pelaporan.
4. Pengungkapan perubahan penyajian atau pengklasifikasian pos-pos.

2.6.4 Penyajian Laporan Keuangan

Pada SAK ETAP diatur tentang penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

1. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
2. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi

berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan (SAK ETAP 2009):

1. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir.
2. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan.
3. Mata uang pelaporan.
4. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.7 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau dikenal dengan istilah SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang dirancang secara khusus untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Adapun yang dimaksud dengan entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP (2009) mengatur bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif dalam penyajian informasi keuangan, karakteristik kualitatif yang dimaksud antara lain:

1. Dapat dipahami, artinya bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang dapat dengan mudah untuk dipahami bagi pengguna.
2. Relevan, artinya laporan keuangan menyajikan informasi harus relevan untuk proses pengambilan keputusan pengguna dengan cara membantu

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas, artinya suatu informasi dipandang material jika kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
4. Keandalan, artinya suatu informasi akan dianggap andal jika informasi tersebut bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
5. Substansi mengungguli bentuk, artinya peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
6. Pertimbangan sehat, artinya berbagai peristiwa dan keadaan yang mengalami ketidakpastian sehingga diperlukan pertimbangan yang sehat dalam menyusun laporan keuangan.
7. Kelengkapan, artinya laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
8. Dapat dibandingkan, artinya pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
9. Tepat waktu, artinya bahwa ketepatan waktu penyediaan informasi laporan keuangan mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya, sehingga laporan keuangan harus disediakan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat, artinya bahwa manfaat dari informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya.

SAK ETAP menyebutkan bahwa laporan keuangan secara lengkap yang dihasilkan terdiri dari lima laporan keuangan, yaitu:

1. neraca;
2. laporan laba rugi;
3. laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - a. seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b. perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. laporan arus kas;
5. catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tabel 2.1

Informasi yang Disajikan dalam Neraca

Akun	Unsur Akun	Klasifikasi
Aset (diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal).	1. Aset lancar	1. Dapat dijual dalam siklus operasi normal. 2. Dimiliki untuk diperdagangkan. 3. Diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan. 4. Berupa kas atau setara kas
	2. Aset tidak lancar	1. Diklasifikasikan sebagai

		<p>aset tidak lancar selain klasifikasi yang dijelaskan pada aset lancar</p> <p>2. Jika siklus operasi tidak dapat diidentifikasi, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.</p>
<p>Kewajiban (diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.</p>	1. Kewajiban jangka pendek	<p>1. Diperkirakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu normal operasi entitas</p> <p>2. Akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan</p> <p>3. Entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian kewajiban</p>
	2. Kewajiban jangka panjang	<p>Selain klasifikasi yang dijelaskan pada kewajiban jangka pendek, maka akan diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka panjang.</p>
Ekuitas	Dijelaskan di PSAK 45	

Sumber: SAK ETAP (2009)

Tabel 2.2

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi

Akun	Analisis Akun	Penyajian
Pendapatan	-	Semua pos penghasilan maupun beban dimasukkan secara keseluruhan dalam satu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain.
Beban keuangan	Berdasarkan sifat atau fungsinya	
Bagian laba atau rugi dari investasi	-	
Beban pajak	Berdasarkan sifat atau fungsinya	
Laba atau rugi netto	-	

Sumber: SAK ETAP (2009)

Tabel 2.3

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Arus Kas

Aktivitas Kas	Unsur Kas	Metode Pelaporan
Aktivitas operasi	1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.	Metode tidak langsung, dimana laba atau rugi netto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan
	2. Penerimaan kas dari pendapatan.	
	3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.	
	4. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan.	
	5. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan.	

	6. Penerimaan dan pembayaran kas untuk tujuan perdagangan yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.	aktivitas investasi dan pendanaan.
Aktivitas investasi	<p>1. Pembayaran kas untuk perolehan aset tetap.</p> <p>2. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, aset jangka panjang lainnya.</p> <p>3. Pembayaran dan penerimaan kas untuk perolehan efek ekuitas.</p> <p>4. Uang muka pinjaman yang diberikan pihak lain.</p> <p>5. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan pihak lain.</p>	Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan.

Aktivitas pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau ekuitas lain. 2. Pembayaran kas kepada pemegang saham. 3. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman. 4. Pelunasan pinjaman. 5. Pembayaran kas oleh <i>lessee</i>. 	
---------------------	--	--

Sumber: SAK ETAP (2009)

2.8 Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45

Secara khusus PSAK 45 (2011) mengatur tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, dimana entitas nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas bisnis. PSAK 45 akan berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti umunya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian

sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Laporan keuangan entitas nirlaba disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Laporan keuangan yang dihasilkan entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari masing-masing laporan keuangan yang dihasilkan entitas nirlaba, mereka disusun atas tujuan:

1. Laporan posisi keuangan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset netto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan keuangan digunakan untuk menilai kemampuan entitas nirlaba dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal.
2. Laporan aktivitas disusun dengan tujuan menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset netto/ekuitas, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
3. Laporan arus kas disusun dengan tujuan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode

4. Catatan atas laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi terkait dengan suatu akun atas transaksi yang membutuhkan penjelasan lebih rinci.

Tabel 2.4

Klasifikasi Akun pada Laporan Posisi Keuangan

Nama Akun	Unsur Akun	Klasifikasi
Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar 2. Aset non lancar 	Disajikan berdasarkan urutan likuiditas.
Liabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liabilitas jangka pendek 2. Liabilitas jangka panjang 	Disajikan berdasarkan urutan likuiditas.
Aset neto/ekuitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terikat permanen 2. Terikat temporer 3. Tidak terikat 	Disajikan sesuai masing-masing kelompok berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Sumber: PSAK 45 (Revisi 2011)

Tabel 2.5

**Klasifikasi Pengaruh Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian
pada Akun Aset Neto/Ekuitas dalam Laporan Aktivitas**

Nama Akun	Aset Neto Terikat Permanen	Aset Neto Terikat Temporer	Aset Neto Tidak Terikat
Pendapatan	-	-	Menambah
Beban	-	-	Mengurangi
Keuntungan	-	-	Menambah
Kerugian	-	-	Mengurangi

Sumber: PSAK 45 (Revisi 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Moleong (2016:5) mengemukakan definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Sekaran dan Bougie (2013:3) yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh jawaban yang luas terhadap pertanyaan melalui wawancara, atau respon terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner, melalui observasi, atau dari informasi berbagai sumber yang telah ada sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu secara lebih mendalam. Umar (2013:69) mengemukakan bahwa penelitian studi kasus adalah eksaminasi sebagian besar atau seluruh aspek-aspek potensial dari unit atau kasus khusus yang dibatasi secara jelas (atau serangkaian kasus) baik berupa individu, keluarga, pusat kesehatan masyarakat, rumah perawat, atau organisasi. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Jiwa Menur yang terletak di Jalan Raya Menur Nomor 120 Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Kertajaya, Gubeng Kota Surabaya. RSJ Menur merupakan salah satu entitas pelaporan rumah

sakit berstatus BLUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tipe rumah sakit khusus kelas A. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyusun desain laporan keuangan RSJ Menur berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui adaptasi dari PSAK 45 dan SAK ETAP.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Umumnya, data primer berupa data langsung dari sumber asli objek yang diteliti, seperti hasil wawancara, hasil observasi langsung, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Data sekunder biasanya berupa buku, catatan, referensi, dan lain-lain yang digunakan sebagai pendukung penelitian. Pada penelitian ini, perolehan data primer berasal dari dokumen instansi untuk dianalisis lebih lanjut dan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang dibuat oleh pihak selain dari instansi yang diteliti.

3.2.1 Data Primer

Data primer pada suatu penelitian didapatkan secara langsung ketika melakukan observasi dan wawancara. Jogiyanto (2004:82) menyatakan untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data analisis isi. Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Profil RSJ Menur
2. Kebijakan akuntansi RSJ Menur
3. Laporan keuangan RSJ Menur

Perolehan data melalui wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan pengetahuan bidang akuntansi keuangan di instansi terkait yang menjadi objek penelitian. Moleong (2016:193) berpendapat bahwa pertanyaan tentang pengetahuan yaitu:

“Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh pengetahuan faktual yang dimiliki responden dengan asumsi bahwa suatu hal dipandang dapat diketahui. Hal-hal itu bukan pendapat atau perasaan, atau merupakan hal-hal yang diketahui seseorang, melainkan fakta dari kasus itu.”

Wawancara akan dilakukan kepada subjek yang memahami pengetahuan atas akuntansi keuangan. Subjek tersebut antara lain staf bagian akuntansi di RSJ Menur.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Jogiyo (2004:82) bahwa untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data dari basis data. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, catatan, maupun sumber data yang dapat mendukung penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini adalah:

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Buku Referensi

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dikutip oleh Moleong, 2016, hal. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam melakukan analisis data, peneliti akan membaginya menjadi beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap persiapan awal

Peneliti akan menganalisis terlebih dahulu kondisi objek penelitian dalam penerapan SAK. Kondisi dan objek penelitian tersebut menjadi latar belakang permasalahan yang terjadi pada objek penelitian, yaitu terkait dengan penerapan standar akuntansi yang masih belum maksimal di pemerintahan maupun badan layanan umum daerah yang didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kendala penerapan standar akuntansi. Langkah selanjutnya adalah menyusun daftar pertanyaan yang ditujukan kepada subjek penelitian selaku informan dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.

2. Tahap analisis ketika di lokasi penelitian

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan selama proses penelitian. Proses penelitian yang dimaksud menurut Moleong (2016:281) merupakan proses yang pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian. Analisis yang dilakukan ketika berada di lokasi penelitian yaitu dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk memperoleh jawaban yang dapat memenuhi kebutuhan data penelitian. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan informan

benar adanya maka peneliti mengambil langkah pengecekan ke subjek lainnya sebagai informan pendukung.

3. Tahap Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moleong, 2016). Uji keabsahan data yang dilakukan peneliti adalah:

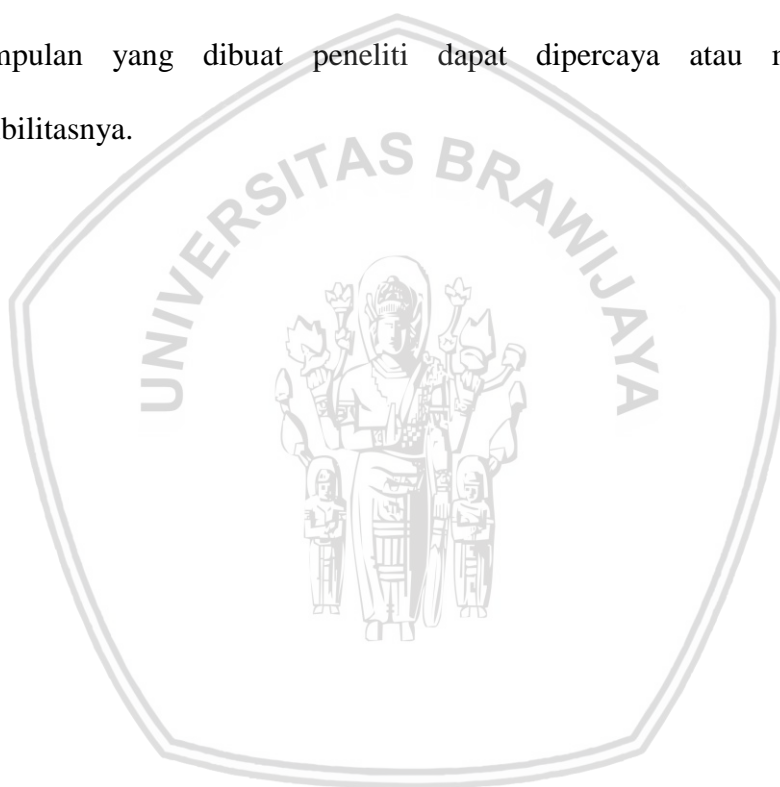
1. Uji kredibilitas, dilakukan dengan konfirmasi antara peneliti terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini dengan menunjukkan atas kebenaran data yang diperoleh di RSJ Menur memang benar adanya dan benar-benar terjadi melalui diskusi (*Small Discussion Group*).
2. Uji konfirmabilitas, peneliti dalam penyusunan kebijakan akuntansi akan melakukan konfirmasi secara langsung kepada Dewan Pengawas RSJ Menur yang sebelumnya merupakan hasil diskusi dengan staf akuntansi RSJ Menur.
3. Uji transferabilitas, peneliti akan memberikan hasil penelitian secara lengkap yaitu berupa kebijakan akuntansi dan desain laporan keuangan. Dalam uji ini akan dilakukan percobaan atas hasil penelitian dengan simulasi penerapan kebijakan akuntansi dan penggunaan desain laporan keuangan yang dibuat peneliti dengan staf akuntansi yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan RSJ Menur.

4. Tahap membuat desain laporan keuangan

Pembuatan desain laporan keuangan akan disusun berdasarkan kebijakan akuntansi hasil adaptasi dari PSAK 45 dan SAK ETAP.

5. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik jika telah didukung dengan bukti yang valid dan konsisten. Adanya bukti yang valid dan konsisten akan menunjukkan bahwa kesimpulan yang dibuat peneliti dapat dipercaya atau menunjukkan kredibilitasnya.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Menur

4.1.1 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Menur

Pada awal tahun 1923, Rumah Sakit Jiwa Menur dikenal sebagai *Doorgangshuis* atau tempat penampungan sementara bagi penderita gangguan jiwa dengan kapasitas 100 tempat tidur. Tahun 1954, Departemen Kesehatan RI membeli tanah seluas 96.840 m² di daerah Menur yang pada masa itu adalah Gubeng. Tanah dengan luas 96.840 m² Sampai tahun 1977, Rumah Sakit Jiwa Menur bertempat di Jl. Karang Tembok yang disebut sebagai rumah sakit jiwa pinggiran. Dalam rangka kunjungan kerja, Dr. Salekan selaku Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa mengadakan pertemuan dengan Prof. Dr. H. R. M. Soejoenoes yang menjabat sebagai Kepala Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dalam pertemuan itu turut hadir pula para staf bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga meliputi dr. Triman Prasadio, dr. W. F. Maramis, dr. Daldiri, dr. Moeljono. Pertemuan tersebut membicarakan soal tanah dan pembangunannya. Pada waktu itu Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa menyetujui tanah yang telah dibeli akan diserahkan kepada pengelola di daerah. Selanjutnya, dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan di daerah terdapat kesepakatan untuk menunjuk dr. Moelyono sebagai penyelenggara pembangunan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Januari 1972 lahir Piagam Kerjasama antara Pengawas, Dr. Bahrawi Wongsokoesomo yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur, Prof. Asmino selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan Prof. Kusumanto Setyonegoro sebagai Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa. Adapun isi Piagam Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya serta memperlengkapinya.
2. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya di bidang kesehatan jiwa kepada masyarakat Jawa Timur.
3. Semua pihak yang tersebut di atas akan menunjang dalam bentuk apapun demi terlaksananya penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Tanggal 24 Maret 1977 Rumah Sakit Jiwa Menur diresmikan oleh Bapak Soenandar Prijosoedarmo selaku Gubernur KDH TK I Jawa Timur dengan nama Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat/Rumah Sakit Jiwa Menur dengan status Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan dipimpin oleh dr. R. Moeljono Notosoedirdjo, Sp.S., Sp,KJ., MPH. Selanjutnya, sebanyak 90 penderita dan 50 orang karyawan dipindahkan dari Rumah Sakit Jiwa Pegirian dengan alasan bangunan sudah tidak layak pakai ke Jalan Menur No. 120 Surabaya. Sejak tahun 1977 sampai 1978 pembangunan Rumah Sakit Jiwa Menur dilakukan secara bertahap melalui Anggaran Pembangunan Departemen Kesehatan dan Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas 100 tempat tidur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat 2 Kepmenkes RI. No. 135/Menkes/SK/IV/1978 ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11/85/Jo SK Gubernur No. 93 Tahun 1985 tanggal 14 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah, Pusat Kesehatan

Jiwa Masyarakat/Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya ditetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas A.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 23 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Daerah Menur Surabaya berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Menur yang berkedudukan di Surabaya dengan status Unsur Penunjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bereselon II-A dengan tempat tidur yang tersedia 240 dari kapasitas 300 tempat tidur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 113 Tahun 2008 menetapkan Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Kelas A Khusus dan Bereselon II-B. Sejak 30 Desember 2008, Rumah Sakit Jiwa Menur telah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan dasar hukum SK Gubernur No. 188/442/kpts/013/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

4.1.2 Lokasi Rumah Sakit Jiwa Menur

Rumah Sakit Jiwa Menur terletak di Jalan Raya Menur No. 120, Manyar, Sabrangan, Mulyorejo, Kertajaya, Gubeng, Kota Surabaya. Luas lahan yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Menur yaitu 38.000 m² dengan luas bangunan sebesar 17.123,80 m².

4.1.3 Status Kepemilikan Rumah Sakit Jiwa Menur

Rumah Sakit Jiwa Menur merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2008 menyatakan bahwa Rumah Sakit Jiwa Menur adalah Badan Layanan

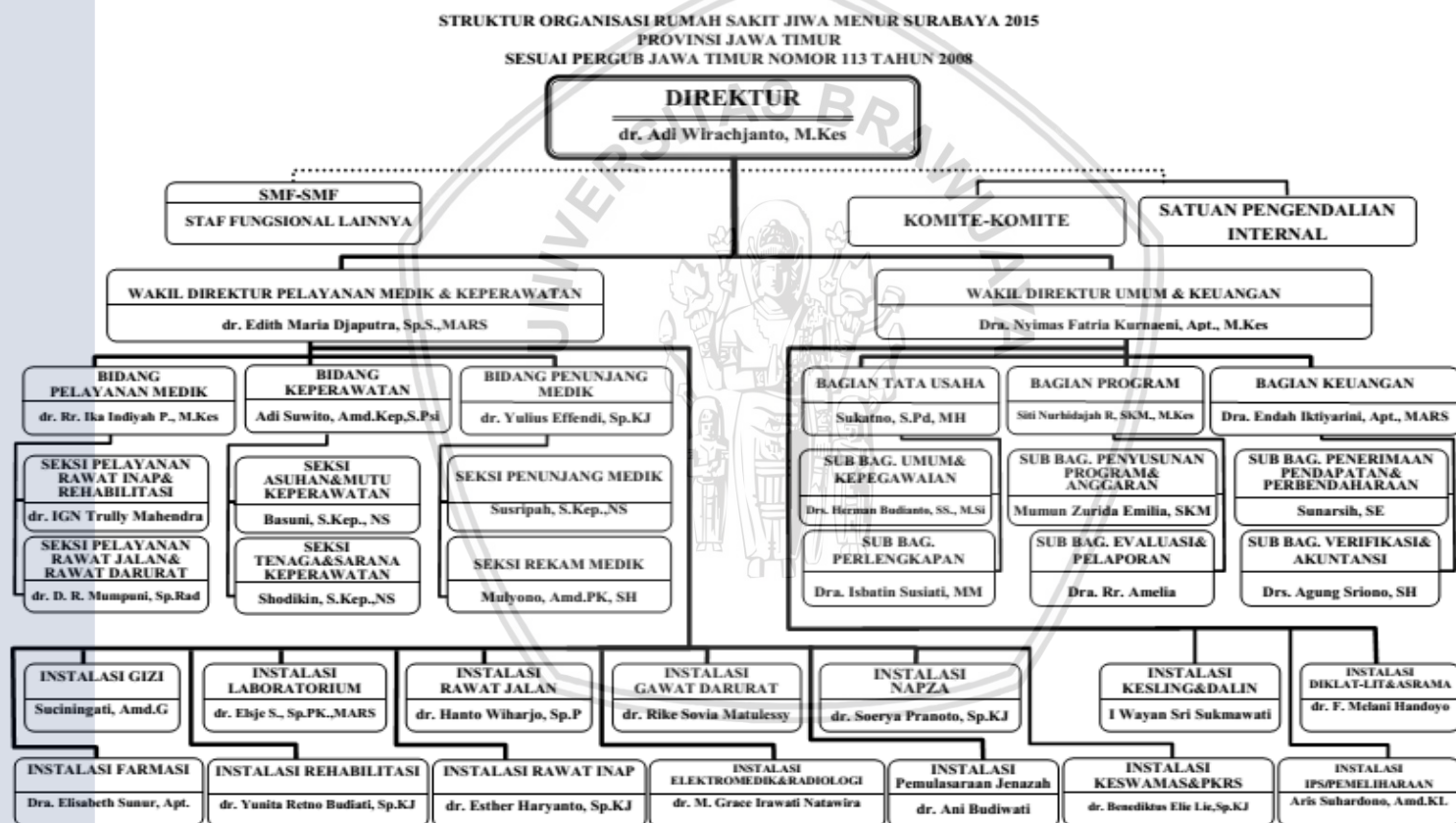
Umum Rumah Sakit Kelas A khusus berseselon II-B. Pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan SK Gubernur No. 188/442/kpts/013/2008 menetapkan Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tanggal 17 Februari 2012 sesuai dalam Kepmenkes RI No. 060/Menkes/SK/II/2012 bahwa Rumah Sakit Jiwa Menur yaitu rumah sakit khusus dengan klasifikasi A.

4.1.4 Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Menur



Gambar 4.1

Struktur Organisasi RSJ Menur



Sumber Data: Profil RSJ Menur 2018

4.2 Laporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Menur Saat Ini

Dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK, RSJ Menur saat ini telah menghasilkan lima laporan keuangan meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan RSJ Menur antara lain aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam neraca RSJ Menur, penyajian ekuitas berupa ekuitas tidak terikat atau semua ekuitas yang ada di RSJ Menur diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak terikat.

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai ekuitas RSJ Menur. Dalam laporan ekuitas disajikan jumlah ekuitas awal RSJ Menur saat pertama kali memperoleh status sebagai BLUD, besarnya ekuitas donasi yang diterima RSJ Menur selama satu tahun anggaran, jumlah surplus/defisit dari laporan operasional untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta koreksi atau penyesuaian ekuitas.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional RSJ Menur memberikan informasi berupa jumlah pendapatan yang diterima dan beban yang terjadi selama satu tahun anggaran. Selain menyajikan pendapatan dan beban dalam satu tahun anggaran bersangkutan, dalam laporan operasional RSJ Menur juga menyajikan pendapatan dan beban tahun anggaran sebelumnya. Penyajian dua periode

tersebut bertujuan agar lebih memudahkan bagi rumah sakit untuk melakukan evaluasi terhadap kenaikan atau penurunan dari pendapatan dan beban RSJ Menur.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas RSJ Menur memberikan informasi keuangan khususnya arus kas masuk dan keluar yang diklasifikasikan sesuai dengan aktivitasnya. Adapun aktivitas arus kas RSJ Menur adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atas informasi keuangan yang ada di neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan RSJ Menur menyajikan informasi antara lain penjelasan laporan keuangan secara umum, penjelasan ekonomi makro, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan penjelasan informasi non keuangan.

4.3 Kebijakan Akuntansi yang Digunakan RSJ Menur Saat Ini

Dalam penyusunan lima komponen laporan keuangan di atas (neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) tidak lepas dari adanya peran kebijakan akuntansi. Penyusunan laporan keuangan berbasis SAK pada RSJ Menur sebagai acuan menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diterapkan untuk tahun

anggaran 2017 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1981 tahun 2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit yang diterapkan mulai tahun 2016. Penerapan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 seharusnya digunakan RSJ Menur sebagai kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAP, namun RSJ Menur menggunakannya sebagai acuan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK. Dapat dikatakan bahwa RSJ Menur masih belum memiliki kebijakan akuntansi sendiri untuk menyusun laporan keuangan berbasis SAK. Salah satu staf akuntansi di RSJ Menur yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan mengungkapkan bahwa:

“Tahun 2015 RSJ Menur sudah menyusun laporan keuangan SAK, tapi kebijakan akuntansi yang dipakai ya dari pergub itu yang sebelumnya namanya pergub nomor 2 tahun 2014 sama KMK nomor 1981 tahun 2010. Untuk kebijakan akuntansi internal SAK masih belum ada, ya jadi nyusun laporan keuangan SAK tetap pakai dari pergub itu yang basisnya SAP.”

Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1981 tahun 2010 memang murni mengatur SAK. Namun, RSJ Menur masih belum memenuhi penerapannya sebab aturan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1981 tahun 2010 masih terlalu rumit untuk diterapkan RSJ Menur, sehingga dalam penyusunan laporan berbasis SAK paling banyak mengacu dari Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1981 tahun 2010 sebagai acuan minimum seperti penggunaan definisi akun-akun tertentu dalam pengertian SAK. Oleh sebab itu, RSJ Menur membutuhkan kebijakan akuntansi internal dengan pendekatan SAK yang dapat disesuaikan dengan kondisi RSJ Menur saat ini. Hal ini sesuai dengan

pernyataan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1981 tahun 2010 bahwa rumah sakit perlu memiliki kebijakan akuntansi internal, antara lain:

“Jika dalam pedoman ini belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.”

Begitu pula yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum:

“Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi BLU. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan kondisi keuangan BLU secara tepat.”

Sesuai dengan pernyataan di atas yang mengatakan bahwa suatu BLU harus mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu disesuaikan dengan kondisi BLU, hal demikian berlaku pula pada entitas yang berstatus sebagai BLUD yang diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Fleksibilitas tersebut diantaranya adalah dana yang dikelola, pengelolaan barang, piutang, perumusan standar, kebijakan, sistem, maupun prosedur pengelolaan keuangan. Hal itu sesuai yang aturan tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 yaitu:

“Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.”

Adapun staf akuntansi yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan di RSJ Menur terdiri dari dua orang yaitu Rindra Kuswantanto, SE dan Nurul Widiastuti, SE. Rindra Kuswanto berperan dalam mengumpulkan data keuangan rumah sakit, membuat konsep jurnal, dan menyusun laporan keuangan. Sedangkan Nurul Widiastuti, SE berperan dalam menyusun jurnal yang sebelumnya secara konsep jurnal telah dibuat oleh Rindra Kuswantanto. Sampai saat ini, RSJ Menur belum memiliki kebijakan akuntansi internal berbasis SAK disebabkan tidak adanya tenaga SDM yang mampu menangani hal tersebut.

4.3.1 Kebijakan Aset Pergub Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 mengatur jika aset diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu aset lancar dan aset non lancar.

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset akan diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Hal-hal yang termasuk dalam kategori aset lancar menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan.

A. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta

bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas tersebut meliputi kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di kas daerah. Kas dan setara kas disajikan sebesar nilai nominal rupiah dari kas dan setara kas yang diterima/dikeluarkan BLUD. Pengakuan kas dan setara kas yaitu ketika kas telah diterima atau kepemilikan dan penguasaannya berpindah menjadi milik BLUD bersangkutan. Kas dan setara kas yang dimaksud dalam hal ini termasuk juga setara kas yang disimpan di bank yang disajikan sesuai dengan saldo nominalnya di bank.

B. Piutang

Pengertian piutang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 merupakan uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017, penggolongan piutang pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah.

Piutang diakui ketika hak untuk menagih timbul namun pemerintah masih belum menerima atas hak tersebut. Piutang yang bersumber dari pendapatan dalam aturan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 akan dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayarkan dan disajikan sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember setelah dikurangi dengan

penyisihan piutang tidak tertagih. Penghitungan penyisihan piutang menggunakan skedul umur piutang yang tercantum pada Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 sebagai berikut:

- a. s/d 1 tahun : 0%
- b. >1 s/d 2 tahun : 10%
- c. >2 s/d 3 tahun : 50%
- d. >3 tahun : 100%

Metode penghapusan piutang menggunakan adalah dengan metode langsung (*direct method*) untuk piutang pendapatan.

C. Persediaan

Definisi persediaan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 yaitu aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi barang atau perlengkapan untuk digunakan maupun disimpan untuk dijual. Pengakuan persediaan yaitu pada saat barang yang diterima telah berpindah hak kepemilikannya atau penguasaannya. Ketika suatu persediaan mengalami kerusakan atau usang, persediaan tidak dilaporkan dalam neraca namun diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran persediaan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 merekomendasikan untuk digunakannya sistem perhitungan fisik (*stock opname*) setiap akhir periode akuntansi dengan perhitungan nilai persediaan metode FIFO (*First In First Out*). Adapun penyajian persediaan adalah sebesar biaya perolehan apabila persediaan diperoleh dengan cara dibeli, lalu akan

disajikan sebesar harga pokok produksi bila persediaan diproduksi sendiri oleh entitas, dan akan disajikan sebesar nilai wajar jika diperoleh dari donasi. Akun persediaan akan tersaji pada neraca sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain rincian persediaan yang ada pada masing-masing entitas dan persediaan yang mengalami kerusakan atau penurunan nilai.

D. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama dua belas bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 terdiri dari deposito berjangka tiga sampai dua belas bulan, pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Investasi jangka pendek diakui dengan dasar adanya SP2D LS atau dengan Surat Pemindahbukuan yang disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal-hal yang dapat membuat sesuatu diakui sebagai investasi jangka pendek adalah adanya kemungkinan perolehan manfaat di masa mendatang dari hasil investasi. Pengukuran investasi jangka pendek diukur menggunakan nilai wajar, untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif menggunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek disajikan sesuai klasifikasi investasi pada pos aset lancar di neraca. Pengungkapan atas investasi jangka pendek meliputi kebijakan akuntansi, jenis investasi perubahan harga pasar investasi, dan hasil investasi.

4.3.1.2 Aset Tetap

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap jika suatu aset mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Aset yang tergolong dalam klasifikasi aset tetap menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan; akumulasi penyusutan. Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehannya sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, apabila nilai aset tetap tidak diketahui maka akan diukur sebesar nilai wajarnya. Untuk aset tetap yang diperoleh dari hibah akan diukur sebesar nilai wajar saat perolehannya. Pengukuran atas penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus.

A. Tanah

Tanah yang dimaksud pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah dapat diperoleh dengan cara membeli ataupun melalui hibah. Pengakuan atas tanah akan diakui jika hak atas kepemilikan telah berpindah menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

B. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimaksud pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Hal-hal yang termasuk dalam klasifikasi peralatan dan mesin antara lain alat-alat berat; alat-alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium, alat persenjataan; alat persenjataan/keamanan.

Peralatan dan mesin dapat diperoleh dengan cara pembelian, hibah, dan swakelola. Peralatan dan mesin yang diperoleh dengan pembelian akan diakui sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur jika BAPB (Berita Acara Penerimaan Barang) diterbitkan dan diukur berdasarkan biaya perolehannya. Apabila peralatan dan mesin diperoleh melalui hibah akan diakui ketika berita acara atas hibah telah diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diukur sebesar nilai wajar saat perolehan. Peralatan dan mesin yang diperoleh secara swakelola diakui menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ketika diterbitkannya Laporan Penyelesaian Pekerjaan yang diukur menggunakan biaya langsung dan tidak langsung.

C. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan diperoleh dengan cara belanja, pertukaran, dan hibah. Gedung dan bangunan yang diperoleh melalui belanja akan diakui sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ketika BAPP (Berita Acara Penyerahan

Pekerjaan) atas belanja modal gedung dan bangunan diterbitkan yang akan diukur berdasarkan biaya perolehannya. Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan cara pertukaran dan hibah akan diakui sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur jika telah disertai dengan BAST (Berita Acara Serah Terima Barang) yang diukur menggunakan nilai wajar. Untuk gedung dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, apabila pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan secara fisik selesai 100% akan direklasifikasikan sebagai aset tetap.

D. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan yang dimaksud pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya yang dilakukan melalui kontrak konstruksi. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan adalah ketika laporan kemajuan fisik diterbitkan, jika pada akhir periode akuntansi secara fisik terealisasi maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai jenisnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sesuai dengan biaya perolehannya yang terdiri dari biaya konstruksi yang berkaitan langsung dengan pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan pada neraca dalam kelompok aset tetap yang dilakukan secara gabungan dengan menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan dari seluruh aset tetap kemudian diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

E. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada saat BAPP (Berita Acara Penyerahan Pekerjaan) diterbitkan dengan syarat bahwa pekerjaan atas jalan, irigasi, jaringan telah diselesaikan 100%. Jalan, Irigasi, dan jaringan diukur berdasarkan biaya perolehannya yang terlibat secara langsung dalam proses perolehan jalan, irigasi, dan jaringan.

F. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang dimaksud pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap yang diantaranya meliputi koleksi terbitan/perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, alat olahraga, hewan, dan tanaman. Koleksi terbitan/perpustakaan/buku yang dimaksud adalah buku yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, bukan media cetak dengan durasi harian. Aset tetap lainnya diukur menggunakan biaya perolehannya.

4.3.1.3 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud menurut Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset

Tidak Berwujud dalam peraturan ini dibedakan menjadi aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dan aset tidak berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas. Adapun yang termasuk dalam aset tidak berwujud antara lain *software*, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, royalti, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat ketika BAPP (Berita Acara Penerimaan Barang). Penyajian aset tidak berwujud pada catatan atas laporan keuangan perlu untuk dilengkapi dengan penjelasan atas masa manfaat, metode amortisasi, rincian pos aset tidak berwujud, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.

4.3.1.4 Aset Lain-lain

Aset lain-lain berguna dalam mencatat aset tetap maupun aset tidak berwujud milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak digunakan lagi karena rusak. Aset lain-lain diakui ketika adanya usulan untuk pemusnahan aset tetap yang tidak dapat digunakan lagi yang disusutkan menggunakan metode yang sama ketika aset tetap maupun aset tidak berwujud diperoleh. Pengukuran aset lain-lain adalah sebesar nilai historisnya ketika aset tetap maupun aset tidak berwujud direklasifikasi. Dalam penyajiannya, aset lain-lain diklasifikasikan sebagai kelompok akun aset lainnya. Pengungkapan yang harus ada pada catatan atas laporan keuangan terkait aset lain-lain yaitu penjelasan obyek yang dimutasi.

4.3.1.5 Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi penyusutan yang dimaksud pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah kumpulan atau jumlah dari penyusutan sejak

aset tetap diperoleh. Penyusutan diakui pada akhir periode pelaporan sesuai dengan bukti memorialnya yang diberlakukan kecuali tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak, tumbuhan, dan barang bercorak kesenian atau benda bersejarah. Penyusutan diukur menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Penyusutan Barang Berupa Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Pada Entitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal-hal yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan meliputi metode penyusutan yang digunakan dan daftar penyesuaian besaran penyusutan atas peningkatan atau penurunan nilai aset tetap.

4.3.2 Kebijakan Kewajiban Pergub Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

Definisi kewajiban dalam Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih dari dua belas bulan.

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

A. Utang Beban

Utang beban menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah kewajiban jangka pendek yang timbul karena Pemerintah Provinsi

Jawa Timur belum membayar beban yang telah dinikmati manfaatnya. Utang beban dalam hal ini diantaranya diperuntukkan untuk biaya-biaya listrik, telepon, dan air; pegawai; jasa pelayanan; pembelian obat dan alat kesehatan pakai habis; biaya makan dan minuman pasien; bagi hasil ke pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya. Utang beban diakui setiap akhir periode akuntansi atas beban yang telah mengalami jatuh tempo namun ketika penyusunan laporan keuangan masih belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, untuk utang beban atas barang akan diakui pada saat penerimaan barang yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetapi belum melakukan pembayaran. Utang beban diukur sebesar nilai nominalnya atas biaya yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari pihak wajib bayar.

B. Utang Bunga

Utang bunga menurut definisi Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 merupakan utang yang timbul karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang seperti utang dari perbankan maupun utang obligasi. Pengakuan utang bunga yaitu pada akhir periode akuntansi setelah melakukan inventarisasi atas utang bunga yang dilakukan bersama dengan inventarisasi utang. Utang bunga diukur sebesar biaya bunga yang telah terjadi tapi belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada saat penyusunan neraca.

C. Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga)

Utang PFK dalam pengertian Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 yaitu utang Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pihak lain yang

disebabkan kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Utang PFK diakui ketika menerima pembayaran dana titipan dari pihak ketiga untuk jaminan pemeliharaan atau retensi yang diberikan ke Kas Umum Daerah. Utang PFK diukur menggunakan besaran saldo pungutan yang belum diserahkan ke pihak ketiga.

D. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada tahun buku bersangkutan. Pengakuan atas pendapatan diterima dimuka adalah pada saat menerima pembayaran dari pihak wajib bayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kas Umum Daerah. Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar nilai nominal uang muka yang disetorkan ke wajib bayar.

E. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 yaitu utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar dua belas bulan sesudah tanggal pelaporan. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat adanya reklasifikasi pinjaman jangka panjang setiap akhir periode akuntansi yang dicatat sebesar nilai saat ini yang dibayarkan atas utang kepada pihak wajib bayar.

F. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengertian Utang jangka pendek lainnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah kewajiban lancar yang tidak termasuk

dalam kategori utang jangka pendek yang telah disebutkan di atas. Utang jangka pendek diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyusun neraca pada akhir periode namun belum melakukan pembayaran atas utang tersebut ke wajib bayar yang diukur sebesar nilai nominal saldo utang.

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah kewajiban dengan jangka waktu pelunasan dalam kurun waktu lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk biaya perolehan aset tetap. Kewajiban jangka panjang diakui ketika diterimanya dana pinjaman atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal yang diukur menggunakan nilai sekarang (*present value*).

4.3.3 Kebijakan Ekuitas Pergub Jawa Tmur nomor 2 tahun 2017

Definisi ekuitas menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 yaitu kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal laporan. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO (Laporan Operasional) dalam neraca. Pengukuran yang digunakan untuk saldo neraca berasal dari saldo akhir ekuitas di laporan perubahan ekuitas.

4.3.4 Kebijakan Pendapatan Pergub Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 mendefinisikan pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik yang

dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional maupun pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pendapatan LO diakui ketika timbul hak atas pendapatan yang harus diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik yang telah terealisasi maupun yang masih dalam bentuk piutang. Sedangkan pendapatan LO atas peraturan perundang-undangan akan diakui ketika hak untuk menagih timbul dengan adanya SKR (Surat Ketetapan Retribusi) atau dokumen yang dipersamakan telah terbit. Untuk pendapatan yang perolehannya tanpa melalui penetapan akan diakui ketika pihak yang bersangkutan melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan bunga dari hasil investasi jangka pendek diakui ketika dilakukan pemindahbukuan pendapatan bunga ke rekening investasi di rekening kas daerah. Pendapatan LO secara keseluruhan diukur berdasarkan nilai bruto atau sebesar hak yang seharusnya diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum adanya kompensasi, kecuali untuk pengukuran pendapatan dari bunga deposito yang diukur sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi biaya administrasi bank. Pendapatan LO disajikan sesuai dengan jenis sumber pendapatannya

4.3.5 Kebijakan Beban Pergub Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

4.3.5.1 Beban Pegawai

Beban pegawai dalam Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 yaitu kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Beban pegawai diakui

ketika timbul kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membayar gaji maupun tunjangan kepada pegawai. Pengukuran beban pegawai adalah sebesar nilai bruto sebelum dikurangi dengan potongan-potongan ataupun pajak penghasilan.

4.3.5.2 Beban Barang dan Jasa

Definisi beban barang dan jasa berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 adalah pemakaian atau konsumsi barang dan jasa untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Hal-hal yang tergolong dalam beban barang dan jasa meliputi beban bahan, beban jasa, beban premi asuransi, beban perawatan dan pemeliharaan, beban cetak dan penggandaan, beban sewa, beban makanan minuman, beban pakaian, beban perjalanan dinas, beban pelatihan dan pendidikan, beban kesehatan masyarakat, dan beban bantuan. Beban barang dan jasa diakui pada saat digunakan/dikonsumsinya barang atau diperolehnya manfaat atas jasa yang diberikan dari pihak ketiga. Terkait dengan pengukuran yang digunakan pada masing-masing jenis beban barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Diukur sebesar nilai yang harus dibayarkan
 - a. Beban bahan
 - b. Beban jasa
 - c. Beban premi asuransi
 - d. Beban sewa
 - e. Beban perjalanan dinas
 - f. Beban kesehatan masyarakat

2. Diukur sebesar kas yang dikeluarkan:
 - a. Beban perawatan dan pemeliharaan
 - b. Beban cetak dan penggandaan
 - c. Beban makanan dan minuman
 - d. Beban pakaian
 - e. Beban pelatihan dan pendidikan
 - f. Beban bantuan

Penyajian beban barang dan jasa pada laporan operasional disesuaikan dengan klasifikasi ekonominya.

4.3.5.3 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang atas ketertagihan piutang. Pengakuan atas beban penyisihan piutang adalah pada akhir periode pelaporan berdasarkan bukti memorial yang diukur menggunakan skedul umur piutang dengan metode langsung.

4.3.5.4 Beban Penyusutan

Pengertian beban penyusutan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 yaitu alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset bersangkutan. Beban penyusutan diakui ketika penyesuaian nilai aset tetap atas penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset tetap yang diukur dengan metode garis lurus. Beban penyusutan dinilai sebesar harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi masa manfaat umur

ekonomis. Informasi yang disajikan di catatan atas laporan keuangan terkait akumulasi penyusutan meliputi metode penyusutan yang digunakan dan daftar penyesuaian yang timbul sebagai akibat dari peningkatan atau penurunan nilai aset tetap.

4.4 Perbandingan Desain Laporan Keuangan pada Pergub Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dengan Kebijakan Baru

4.4.1 Neraca

Berikut adalah gambar desain neraca menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017:

Tabel 4.1

Format Desain Neraca Menurut Pergub Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Neraca
Per 31 Desember 20XX dan 20X-1

No	Uraian	Catatan	20XX	20X-1
1	ASET			
2	<u>ASET LANCAR</u>			
3	Kas dan Setara Kas			
4	Piutang			
5	Beban Dibayar Dimuka			
6	Persediaan			
6	Jumlah Aset Lancar			
7	<u>INVESTASI JANGKA PANJANG</u>			
8	<u>ASET TETAP</u>			
9	Tanah			
10	Peralatan dan Mesin			
11	Gedung dan Bangunan			
12	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
13	Aset Tetap Lainnya			
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
15	Akumulasi Penyusutan			
15	Jumlah Aset Tetap			
16	<u>DANA CADANGAN</u>			

17	Jumlah Dana Cadangan			
18	<u>ASET LAINNYA</u>			
19	<u>TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN</u>			
20	<u>TUNTUTAN PERBENDAHARAAN</u>			
21	<u>TUNTUTAN GANTI RUGI</u>			
22	<u>ASET TIDAK BERWUJUD</u>			
23	ASET LAIN-LAIN			
24	<u>AKM PENYST ASET LAIN-LAIN</u>			
25	Jumlah Aset Lainnya			
26	TOTAL ASET			
27	KEWAJIBAN			
28	<u>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u>			
29	Utang PFK			
30	Utang Bunga			
31	Utang Potongan/Pungutan Bendaharawan			
32	Bagian Lancar dari Hutang Jangka Panjang			
33	Pendapatan Diterima Dimuka			
34	Utang Belanja			
35	Utang Jangka Pendek Lainnya			
34	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
35	<u>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</u>			
36	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			
37	TOTAL KEWAJIBAN			
38	EKUITAS			
39	Ekuitas			
41	Surplus/Defisit			
42	Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih)			
43	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan			
44	TOTAL EKUITAS			
45	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

Kelompok aset lancar pada neraca di atas tidak disebutkan akun uang muka yang seharusnya tersaji dalam kelompok aset lancar pada kebijakan berdasarkan SAK. Selain itu, investasi jangka panjang jika pada neraca SAK rumah sakit tidak tersaji sebab rumah sakit tidak melakukan investasi jangka panjang sehingga tidak dilaporkan pada neraca, begitu pula dengan akun tagihan penjualan, tuntutan ganti rugi, dan tuntutan perbendaharaan yang tidak disajikan

pada neraca SAK sebab transaksi rumah sakit tidak melibatkan pos-pos tersebut. Jadi, apa yang tersaji pada neraca berdasarkan SAK adalah benar-benar hanya akun yang terdapat pada pos aset baik aset lancar dan non lancar, pos kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan ekuitas.

4.4.2 Laporan Operasional

Berikut adalah desain neraca menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017:

Tabel 4.2
Format Desain Laporan Operasional Menurut Pergub Jawa Timur nomor 2
tahun 2017
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Laporan Operasional
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Uraian	Catatan	20X1	20X0	(Kenaikan/ Penurunan)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
Pendapatan LO					
Jumlah PAD LO					
Pendapatan Transfer LO					
Jumlah Pend. Transfer LO					
Lain-lain Pendapatan yang sah LO					
Jumlah lain-lain pend. yang sah					
Jumlah Pendapatan Operasional					
Beban					
Beban Operasi					
Jumlah Beban Operasi					
Beban Transfer					
Jumlah Beban Transfer					
Jumlah Beban					
Surplus/defisit kegiatan operasional					
Surplus kegiatan non operasional					
Jumlah surplus kegiatan non.					
Op					
Defisit kegiatan non operasional					
Jumlah defisit kegiatan non. Op					
Surplus/Defisit kegiatan non.op					

Pos Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa LO					
Jumlah Pend. Luar Biasa LO					
Beban Luar Biasa					
Jumlah Beban Luar Biasa LO					
Jumlah Pos Luar Biasa					
Jumlah Beban					
SURPLUS/DEFISIT LO					

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

Perbedaan antara laporan operasional di atas dengan laporan operasional SAK adalah bahwa pos-pos yang tersaji pada laporan operasional SAK merupakan akun-akun yang ada di pos pendapatan dan beban, atau dalam hal ini adalah pos-pos yang berhubungan secara langsung dengan aktivitas operasional rumah sakit. Begitu pula, tidak terdapat pendapatan transfer karena memang rumah sakit tidak menerima pendapatan transfer serta tidak ada beban transfer sebab rumah sakit tidak melakukan transfer ke suatu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dibawahnya. Perbedaan juga terlihat dengan tersajinya pos luar biasa pada laporan operasional menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017, sedangkan pada laporan operasional SAK tidak menyajikannya sebab dalam aturan SAK ETAP tidak diperbolehkan suatu entitas menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa.

4.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Pada Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 masih belum ada desain laporan perubahan ekuitas. Namun, terdapat struktur yang tersaji pada laporan perubahan ekuitas menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 antara lain koreksi kesalahan akibat perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan

mendasar seperti kesalahan dari persediaan di periode sebelumnya atau adanya perubahan nilai aset tetap.

4.4.4 Laporan Arus Kas

Berikut adalah gambar desain neraca menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017:

Tabel 4.3

Format Desain Laporan Arus Kas Menurut Pergub Jawa Timur nomor 2

tahun 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20X-1

No	Uraian	Catatan	20XX	20X-1
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak			
4	Penerimaan Daerah Bukan Pajak			
5	Penerimaan Hibah			
6	Penerimaan Dana			
7	Penerimaan Laba Perusahaan Daerah			
8	Jumlah Arus Kas Masuk			
9	Arus Keluar Kas			
10	Pembaayaran Pegawai			
11	Pembayaran Barang			
12	Pembayaran Bunga			
13	Pembayaran Hibah			
14	Pembayaran Bantuan Sosial			
15	Pembayaran Tak Terduga			
16	Jumlah Arus Kas Keluar			
17	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			
18	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
19	Arus Masuk Kas			
20	Pencairan Dana Cadangan			
21	Penjualan Aset Tetap			
22	Penjualan Aset Lainnya			
23	Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			

24	Jumlah Arus Kas Masuk			
25	Arus Keluar Kas			
26	Pembentukan Dana Cadangan			
27	Perolehan Aset Tetap			
28	Belanja Aset Tetap Lainnya			
29	Belanja Aset Lainnya			
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
31	Jumlah Arus Kas Keluar			
32	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>			
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman			
36	Penerimaan Kembali Pinjaman			
37	Jumlah Arus Kas Masuk			
38	Arus Keluar Kas			
39	Pembayaran Pokok Pinjaman			
40	Pembayaran Pinjaman			
41	Pemberian Pinjaman			
42	Penerimaan Kembali Pinjaman			
43	Jumlah Arus Kas Keluar			
44	<i>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</i>			
45	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran			
46	Arus Masuk Kas			
47	Penerimaan Sisa UP/GU/TU			
48	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
49	Jumlah Arus Kas Masuk			
50	Arus Keluar Kas			
51	Pengeluaran Sisa SP2D UP/GU/TU			
52	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
53	Jumlah Arus Kas Keluar			
54	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</i>			
55	Kenaikan/Penurunan Kas			
56	Saldo Awal Kas di BLUD			
57	Saldo Kas Lainnya			
58	Saldo Akhir Kas di BLUD			
59	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran			
60	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan			
61	Saldo Akhir Kas			

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

Perbedaan laporan arus kas menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dengan kebijakan SAK adalah terletak dari komponen yang terdapat pada masing-masing aktivitas. Seperti aktivitas operasi yang terdapat pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 untuk arus masuk kas meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan daerah bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan laba perusahaan daerah, transfer masuk; untuk arus keluar meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, pembayaran hibah, bantuan sosial, pembayaran tak terduga. Sedangkan aktivitas operasi pada laporan arus kas SAK untuk arus masuk yang merupakan kas yang berasal dari pendapatan operasional rumah sakit, untuk arus keluar kas juga berasal dari aktivitas yang berhubungan langsung dengan aktivitas atau siklus operasional rumah sakit.

Aktivitas investasi pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dengan kebijakan baru adalah sama yaitu untuk arus masuk meliputi pemasukan dari penjualan aset tetap, sedangkan untuk arus keluar yang berupa pengeluaran untuk perolehan aset tetap. Untuk aktivitas pendanaan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 atau aktivitas pembiayaan menurut kebijakan SAK terdapat perbedaan diantara keduanya. Kedua kebijakan tersebut sama-sama menyebutkan bahwa arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan berasal dari penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, dan pencairan dana cadangan. Namun pada kebijakan SAK akan menambahkan penerimaan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan BLUD sebab rumah sakit menerima dana-dana tersebut

sebagai bentuk pembiayaan jangka panjang. Sedangkan untuk arus keluar meliputi pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman.

4.5 Perbandingan Kebijakan Akuntansi pada Pergub Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dengan Kebijakan Baru

4.5.1 Aset

4.5.1.1 Aset Lancar

Berikut adalah perbandingan klasifikasi aset lancar pada Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 dengan kebijakan yang peneliti rekomendasikan:

Tabel 4.4

Klasifikasi Aset Lancar

Aset Lancar Berdasarkan Pergub Jatim nomor 2 tahun 2017	Aset Lancar Berdasarkan Rekomendasi Peneliti
1. Kas dan Setara Kas 2. Investasi Jangka Pendek 3. Piutang 4. Beban Dibayar Dimuka 5. Persediaan	1. Kas dan Setara Kas 2. Investasi Jangka Pendek 3. Piutang 4. Beban Dibayar Dimuka 5. Persediaan 6. Uang Muka Pengadaan

A. Kas dan Setara Kas

1. Definisi

Pada bagan akun standar yang lama menyebutkan bahwa kas dan setara kas meliputi kas dan setara kas di bendahara penerimaan, kas dan setara kas di bendahara pengeluaran, kas dan setara kas di bendahara pengeluaran pembantu, dan kas di kas daerah. Pada kebijakan yang peneliti

rekomendasikan akan menambahkan pos kas dan setara kas di bank sebab rumah sakit juga menyimpan sejumlah kasnya di bank.

2. Pengakuan

Pengakuan atas kas dan setara kas pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu diakui ketika kas telah diterima atau berpindahnya kepemilikan.

3. Pengukuran

Pengakuan atas kas dan setara kas pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu diukur sebesar nilai nominal kas dan setara kas bersangkutan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Bentuk penyajian sama, yang membedakan adalah dari segi klasifikasi kas dan setara kas yang disajikan dalam neraca menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 meliputi kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya, dan setara kas. Sedangkan kas dan setara kas yang tersaji dalam neraca menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan meliputi kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pembantu, kas di kas daerah, dan kas di bank. Terdapat unsur kas di bank sebab rumah sakit juga menyimpan sejumlah kasnya pada bank yang menjadi pilihan rumah sakit untuk menyimpan sejumlah

kasnya. Kas dan setara kas selain di bank, juga terdapat kas dan setara kas yang ada di bendahara penerimaan, bendaharan pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, serta kas di kas daerah. Kas dan setara kas di bendahara penerimaan adalah sejumlah kas yang disimpan oleh orang yang diberi wewenang untuk menyimpan dan mempertanggungjawabkan pendapatan rumah sakit atas fungsi BLUD. Kas dan setara kas di bendahara pengeluaran adalah sejumlah kas yang disimpan oleh orang yang diberi wewenang untuk menyimpan dan mempertanggungjawabkan atas fungsi belanja rumah sakit sebagai BLUD. Kas dan setara kas di bendahara pengeluaran pembantu difungsikan untuk kas yang akan disetorkan kepada pihak-pihak untuk dilakukan pembayaran dalam rangka melancarkan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan BLUD bersangkutan. Untuk kas di kas daerah meliputi kas pendapatan asli daerah yang disetorkan kepada bendahara umum daerah dan disimpan pada rekening kas umum daerah.

B. Piutang

1. Definisi

Penggolongan piutang pendapatan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 antara lain piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah. Piutang pendapatan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan meliputi piutang pendapatan jasa layanan BLUD atau piutang pasien, piutang pendapatan hasil pemanfaatan aset BLUD, piutang

pendapatan pengembalian belanja BLUD, dan akumulasi penyisihan piutang. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan pendapatan rumah sakit sebagian besar adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan berupa pelayanan kesehatan yang umumnya menimbulkan terjadinya piutang pasien. Untuk piutang pendapatan hasil pemanfaatan aset BLUD adalah piutang dari hasil pemanfaatan aset tetap seperti ketika ada penyewaan gedung yang dimiliki rumah sakit maka akan diklasifikasikan sebagai pendapatan dari pemanfaatan aset. Piutang pendapatan pengembalian belanja yang ada di rumah sakit adalah pengembalian atas pengadaan belanja barang dan/atau jasa yang tidak terealisasi sehingga dana tersebut wajib untuk dikembalikan kepada rumah sakit.

2. Pengakuan

Pengakuan atas piutang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu diakui ketika timbul hak untuk menagih yang belum diterima RSJ Menur.

3. Pengukuran

Metode penghapusan piutang pada Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 menggunakan metode langsung (*direct method*). Metode penghapusan piutang pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah menggunakan metode penyisihan (*allowance method*) sebab umur piutang telah diklasifikasikan dalam skedul umur piutang sehingga penggunaan metode penyisihan lebih tepat daripada metode langsung. Alasan lain yang

mendasari bahwa penggunaan metode penyisihan lebih tepat karena dilakukannya perhitungan terhadap piutang tak tertagih setiap terjadinya transaksi piutang tanpa menunggu pihak terutang menyatakan tidak sanggup membayar utangnya. Apalagi piutang yang ada di rumah sakit merupakan akun yang paling beresiko tinggi untuk tidak menerima pembayaran kembali dari pihak terutang, oleh sebab itu lebih baik jika rumah sakit mengambil tindakan preventif untuk menghitung besaran penyisihan piutang yang mungkin tidak tertagih terhadap tagihan piutang.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian piutang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu disajikan sebesar jumlah tagihan piutang setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

C. Persediaan

1. Definisi

Definisi atas persediaan yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi persediaan menurut SAK ETAP yaitu barang yang disimpan untuk digunakan sebagai kebutuhan maupun untuk dijual.

2. Pengakuan

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 mengatur bahwa jika ada persediaan yang usang atau mengalami kerusakan maka tidak dilaporkan di neraca, melainkan akan diungkapkan di catatan atas

laporan keuangan. Sedangkan jika ada persediaan yang mengalami kerusakan atau usang menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah mengakui kerusakan atau penurunan nilai persediaan sebagai beban pada laporan laba rugi atau laporan operasional, begitu pula persediaan pada neraca juga mengalami penurunan atas terjadinya persediaan yang rusak atau mengalami penurunan tersebut. Hal itu dikarenakan perlakuan persediaan menurut SAK ETAP tentang persediaan menyatakan bahwa ketika entitas mengalami kerugian maupun penurunan nilai persediaan maka akan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi atau laporan operasional.

3. Pengukuran

Pengukuran persediaan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 menggunakan perhitungan periodik dengan metode FIFO (*First in First Out*). Sedangkan pada kejadian yang ada di rumah sakit untuk perhitungan persediaan adalah menggunakan sistem perhitungan periodik namun untuk perhitungan nilai persediaan telah otomatis terkalkulasi dengan *software* avisena. Pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan terkait dengan persediaan yaitu untuk perhitungan agar menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO yang dikalkulasi dengan *software* avisena. Sebab jenis persediaan yang ada di rumah sakit sangat variatif terutama untuk persediaan medis sehingga perhitungan perpetual lebih tepat daripada perhitungan secara periodik yang akan

memudahkan pengawasan terhadap persediaan yang memiliki masa kadaluwarsa.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian persediaan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu menyajikan persediaan biaya perolehan jika persediaan didapatkan dengan cara dibeli dan disajikan sebesar nilai wajar jika diperoleh melalui donasi.

D. Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 masih belum menyajikan aturan terkait dengan beban dibayar dimuka, sehingga aturan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan memang baru dibuat dengan menyesuaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di RSJ Menur.

E. Investasi Jangka Pendek

1. Definisi

Hal yang membedakan adalah bentuk dari investasi jangka pendek untuk versi Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 terdiri dari deposito berjangka tiga sampai dua belas bulan, pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, pembelian Surat Bank Indonesia (SBI), dan pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Sedangkan dalam kebijakan yang peneliti rekomendasikan berdasarkan keadaan rumah sakit, investasi hanya berupa deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas

bulan sebab rumah sakit hanya berinvestasi melalui deposito berjangka saja.

2. Pengakuan

Pengakuan atas hasil pendapatan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 berupa hasil bunga deposito, bunga SUN dan SPN, serta bunga SBI. Sedangkan hasil pendapatan yang diakui menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah hanya berupa pendapatan hasil dari bunga deposito berjangka.

3. Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek terdiri dua metode menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 yaitu nilai wajar, nilai nominal untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Sedangkan dalam kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah mengukur investasi jangka pendek menggunakan nilai nominal saja sebab investasi jangka pendek hanya berupa deposito berjangka yang akan diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada bilyet, sama halnya untuk pendapatan bunga deposito yang diukur sesuai dengan yang tercantum pada laporan saldo di bank.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan di catatan atas laporan keuangan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 terdiri dari kebijakan akuntansi, jenis investasi, perubahan kebijakan investasi, investasi yang diukur dengan nilai wajar, dan hasil investasi. Sedangkan dalam kebijakan

yang peneliti rekomendasikan antara lain mengungkapkan rincian perjanjian jangka waktu pengambilan deposito, nilai nominal, nama bank bersangkutan, dan rincian waktu pengambilan deposito.

F. Uang Muka

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 masih belum menyajikan aturan terkait dengan beban dibayar dimuka, sehingga aturan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan memang baru dibuat dengan menyesuaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di RSJ Menur.

4.5.1.2 Aset Tetap

A. Tanah

1. Definisi

Definisi tanah yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi tanah menurut peneliti yaitu tanah yang dimiliki rumah sakit untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengakuan

Pengakuan tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan aset tetap pada SAK ETAP yaitu diakui ketika tanah telah menjadi milik rumah sakit dan siap untuk digunakan.

3. Pengukuran

Pengukuran tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran aset tetap pada SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehannya.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian tanah pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu menyajikan tanah sebesar biaya perolehannya.

B. Peralatan dan Mesin

1. Definisi

Definisi peralatan dan mesin yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi aset tetap pada SAK ETAP yaitu peralatan dan mesin yang dimiliki rumah sakit untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengakuan

Pengakuan peralatan dan mesin berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan aset tetap pada SAK ETAP yaitu diakui ketika peralatan dan mesin telah menjadi milik rumah sakit dan siap untuk digunakan.

3. Pengukuran

Pengukuran peralatan dan mesin berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran

aset tetap pada SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehannya. Perbedaan dari dua kebijakan tersebut adalah terletak dari aturan setelah pengakuan awal atas aset tetap. Jika pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 belum memberikan aturan tersebut, maka pengukuran setelah pengakuan awal dalam SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin serta akumulasi kerugian penurunan nilai.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian peralatan dan mesin pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu menyajikan peralatan dan mesin sebesar biaya perolehannya.

C. Gedung dan Bangunan

1. Definisi

Definisi gedung dan bangunan yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi aset tetap pada SAK ETAP yaitu gedung dan bangunan yang dimiliki rumah sakit sebagai tempat melaksanakan kegiatan atau tugas operasionalnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengakuan

Pengakuan gedung dan bangunan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan

aset tetap pada SAK ETAP yaitu diakui ketika gedung dan bangunan telah menjadi milik rumah sakit dan siap untuk digunakan.

3. Pengukuran

Pengukuran gedung dan bangunan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran aset tetap pada SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehannya. Perbedaan dari dua kebijakan tersebut adalah terletak dari aturan setelah pengakuan awal atas aset tetap. Jika pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 belum memberikan aturan tersebut, maka pengukuran setelah pengakuan awal dalam SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan serta akumulasi kerugian penurunan nilai.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian gedung dan bangunan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu menyajikan gedung dan bangunan sebesar biaya perolehannya.

D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1. Definisi

Definisi jalan, irigasi, dan jaringan yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi aset tetap pada SAK ETAP yaitu jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki rumah sakit sebagai aset penunjang dalam melaksanakan kegiatan

atau tugas operasionalnya yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengakuan

Pengakuan jalan, irigasi, dan jaringan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan aset tetap pada SAK ETAP yaitu diakui ketika jalan, irigasi, jaringan telah menjadi milik rumah sakit dan siap untuk digunakan.

3. Pengukuran

Pengukuran jalan, irigasi, dan jaringan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran aset tetap pada SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehannya. Perbedaan dari dua kebijakan tersebut adalah terletak dari aturan setelah pengakuan awal atas aset tetap. Jika pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 belum memberikan aturan tersebut, maka pengukuran setelah pengakuan awal dalam SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan serta akumulasi kerugian penurunan nilai.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian jalan, irigasi, dan jaringan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu menyajikan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar biaya perolehannya.

E. Konstruksi dalam Pengerjaan

1. Definisi

Definisi konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi konstruksi dalam pengerjaan menurut SAK ETAP yaitu aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

2. Pengakuan

Dalam kebijakan yang tercantum pada kebijakan Pergub nomor 2 tahun 2017, konstruksi dalam pengerjaan diakui ketika laporan kemajuan fisik diterbitkan. Sedangkan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada setiap termin pekerjaan konstruksi berdasarkan persentase penyelesaiannya. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan persentase penyelesaian menurut peneliti lebih direkomendasikan sebab dengan diakuinya berdasarkan persentase, akan memudahkan rumah sakit dalam perhitungan besarnya pengeluaran pada setiap termin penyelesaian.

3. Pengukuran

Pada kebijakan konstruksi dalam pengerjaan menurut Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 menyatakan bahwa konstruksi dalam pengerjaan dilakukan melalui kontrak konstruksi. Dalam peraturan tersebut belum menyebutkan bentuk dari kontrak konstruksi yang dapat diterapkan seperti kontrak harga tetap (*lump sum*) atau dengan kontrak harga tidak tetap (*biaya plus*). Pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah dengan

menggunakan kontrak harga tetap sebab pelaksanaan kontrak konstruksi akan menjadi lebih terstruktur. Hal tersebut dikarenakan kontrak harga tetap perlu perencanaan proyek yang matang dengan mengetahui nilai per satuan atas aset yang akan dikerjakan melalui konstruksi dalam pengerjaan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian konstruksi dalam pengerjaan di neraca menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu disajikan dalam kelompok aset tetap dengan menjumlahkan seluruh konstruksi secara gabungan.

F. Aset Tetap Lainnya

1. Definisi

Aset tetap lainnya menurut Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 meliputi koleksi terbitan/perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, aset bersejarah, alat olahraga, hewan, dan tanaman. Pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan, aset tetap lainnya hanya terdiri dari koleksi terbitan/perpustakaan/buku, barang bercorak seni, barang budaya, dan alat olahraga sesuai dengan apa yang dimiliki oleh rumah sakit.

2. Pengakuan

Pengakuan aset tetap lainnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan aset

tetap pada SAK ETAP yaitu diakui ketika aset tetap lainnya telah menjadi milik rumah sakit dan siap untuk digunakan.

3. Pengukuran

Pengukuran aset tetap lainnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran aset tetap pada SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehannya. Perbedaan dari dua kebijakan tersebut adalah terletak dari aturan setelah pengakuan awal atas aset tetap. Jika pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 belum memberikan aturan tersebut, maka pengukuran setelah pengakuan awal dalam SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya serta akumulasi kerugian penurunan nilai.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset tetap lainnya pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu menyajikan aset tetap lainnya sebesar biaya perolehannya.

4.5.1.3 Aset Tidak Berwujud

1. Definisi

Aset tidak berwujud menurut klasifikasi pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 terdiri dari *software*, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, royalti, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Klasifikasi aset tidak berwujud

menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan hanya berupa *software* SIM KES Rumah Sakit sesuai atas aset tidak berwujud yang ada di rumah sakit.

2. Pengakuan

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 menyebutkan bahwa aset tidak berwujud dibagi menjadi dua berdasarkan masa manfaat yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dan aset tidak berwujud dengan umur yang tak terbatas. Pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah mengklasifikasikan seluruh aset tidak berwujud sebagai aset tidak berwujud dengan umur terbatas sesuai dengan aturan pada SAK ETAP. Alasan lain antara lain aset tidak berwujud yang dimiliki rumah sakit hanya berupa *software* SIM KES yang otomatis pasti memiliki masa manfaat, sebab *software* harus selalu mengalami pembaruan.

3. Pengukuran

Pengukuran aset tidak berwujud berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran aset tidak berwujud pada SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehannya. Perbedaan dari dua kebijakan tersebut adalah terletak dari aturan setelah pengakuan awal atas aset tidak berwujud. Jika pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 belum memberikan aturan tersebut, maka pengukuran setelah pengakuan awal dalam SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi amortisasi lainnya serta akumulasi kerugian penurunan nilai.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset tidak berwujud pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu menyajikan aset tidak berwujud sebesar biaya perolehannya.

4.5.1.4 Aset Lain-lain

1. Definisi

Definisi aset lain-lain yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi aset lain-lain berdasarkan pemahaman peneliti yaitu aset tetap atau aset tidak berwujud milik rumah sakit yang akan dihapuskan.

2. Pengakuan

Pengakuan aset lainnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan aset tetap berdasarkan pemahaman peneliti yaitu diakui ketika adanya usulan penghapusan aset tetap atau aset tidak berwujud.

3. Pengukuran

Pengukuran aset lain-lain berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran aset lain-lain berdasarkan pemahaman peneliti yaitu diukur sebesar nilai historis ketika aset tetap atau tidak berwujud diklasifikasikan sebagai aset lain-lain.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset lain-lain pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 selaku kebijakan akuntansi RSJ Menur saat ini telah sesuai dengan aturan menurut SAK ETAP yaitu menyajikan aset lain-lain sebagai bagian dari aset lancar pada neraca.

4.5.1.5 Akumulasi Penyusutan Aset

1. Definisi

Definisi akumulasi penyusutan aset yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi akumulasi penyusutan aset berdasarkan pemahaman peneliti yaitu nilai pengurang nilai ekonomis dari aset tetap.

2. Pengakuan

Pengakuan akumulasi penyusutan aset berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan akumulasi penyusutan aset berdasarkan pemahaman peneliti yaitu diakui setiap akhir periode akuntansi.

3. Pengukuran

Pengukuran akumulasi penyusutan aset berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran akumulasi penyusutan aset dalam SAK ETAP yaitu diukur dengan metode garis lurus.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian akumulasi penyusutan aset berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan penyajian akumulasi penyusutan aset menurut pemahaman peneliti yaitu sebesar hasil perhitungan akumulasi penyusutan aset bersangkutan.

4.5.1.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 masih belum terdapat aturan terkait dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud, sehingga kebijakan yang peneliti rekomendasikan baru dibuat dengan menyesuaikan kondisi rumah sakit.

4.5.2 Kewajiban

4.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 menyebutkan utang jangka pendek terdiri dari utang beban, utang bunga, utang PFK, pendapatan diterima dimuka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya. Menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan, utang jangka pendek meliputi utang usaha, utang beban, utang PFK, bagian lancar dari utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya. Jika pendapatan diterima dimuka menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 masuk kategori utang jangka pendek, maka untuk kebijakan yang peneliti rekomendasikan akan disajikan terpisah dari dua kategori utang (utang jangka pendek maupun utang jangka panjang) sebab pendapatan tersebut tidak dapat dipastikan kapan akan diterima secara penuh oleh

rumah sakit. Perbedaan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dengan kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah dipecahnya akun utang beban menjadi dua akun yaitu menjadi utang usaha dan utang beban. Tujuan dipecahnya akun utang beban adalah untuk memudahkan dalam membedakan utang yang timbul akibat menanggung biaya-biaya atau utang yang timbul karena memiliki keterkaitan dengan kelangsungan usaha.

1. Pengakuan

Semua kategori sama, yaitu pada saat telah diterimanya manfaat dari barang/jasa namun rumah sakit belum melakukan pembayaran atas manfaat dari barang/jasa tersebut.

2. Pengukuran

Pengukuran kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran utang jangka pendek dalam SAK ETAP yaitu sebesar jumlah nominal terutang.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian utang jangka pendek berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan penyajian utang jangka pendek menurut SAK ETAP yaitu sebesar nilai nominal terutang.

4.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

1. Definisi

Definisi kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017

memiliki kesamaan dengan definisi utang jangka panjang berdasarkan SAK ETAP yaitu utang yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari dua belas bulan.

2. Pengakuan

Pengakuan utang jangka panjang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan pengakuan utang jangka panjang berdasarkan pemahaman peneliti yaitu diakui pada saat telah diterimanya manfaat dari barang/jasa namun rumah sakit belum melakukan pembayaran atas manfaat dari barang/jasa tersebut.

3. Pengukuran

Pengukuran kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengukuran utang jangka panjang dalam SAK ETAP yaitu sebesar nilai saat ini dari utang.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian utang jangka panjang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan penyajian utang jangka panjang menurut SAK ETAP yaitu sebesar nilai saat ini dari utang.

4.5.3 Ekuitas

1. Definisi

Definisi ekuitas yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi ekuitas

berdasarkan SAK ETAP yaitu kekayaan bersih yang dimiliki rumah sakit hasil selisih dari aset dengan kewajiban.

2. Pengakuan

Pengakuan ekuitas menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 yaitu pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke neraca. Sedangkan pengakuan ekuitas menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan lebih mengatur kapan ekuitas yang diterima diakui sebagai milik rumah sakit.

3. Pengukuran

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 masih belum menyajikan aturan terkait pengukuran ekuitas. Pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan ekuitas akan diukur sebesar nilai nominal untuk ekuitas awal serta nilai perolehan atau nilai wajar jika ekuitas berupa aset sumbangan/bantuan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian ekuitas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait ekuitas pada SAK ETAP bahwa saldo ekuitas yang tersaji pada neraca merupakan saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.5.4 Pendapatan

1. Definisi

Pendapatan atau disebut juga pendapatan LO menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 terdiri dari dua kelompok besar yaitu

pendapatan dari kegiatan operasional dan pendapatan dari kegiatan non operasional. Begitu pula dengan pendapatan yang ada pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan yang mengklasifikasikan meliputi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Hanya saja unsur pendapatan operasional/non operasional yang ada di Peraturan Gubernur Jawa Timur tidak sama dengan pendapatan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan. Pendapatan yang ada pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 sebagian besar berupa pendapatan dari pajak, bea balik nama, pendapatan denda, pendapatan fasilitas sosial, dan lain-lain. Sedangkan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan, pendapatan operasionalnya antara lain adalah pendapatan yang berhubungan dengan jalannya kegiatan usaha seperti pendapatan dari pelayanan kesehatan, kegiatan fungsional, pendapatan hibah, dan penyesuaian pendapatan klaim. Untuk pendapatan dari non operasional, Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dan kebijakan yang peneliti rekomendasikan memiliki kesamaan yaitu pendapatan dari keuntungan penjualan atau penghapusan aset tetap. Hal yang membedakan lagi adalah pendapatan pemanfaatan aset non lancar, yang apabila pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 diklasifikasikan sebagai pendapatan non operasional, sedangkan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional sebab aset yang dimanfaatkan tersebut berhubungan dengan fungsi operasional dari kegiatan fungsional.

2. Pengakuan

Pengakuan pendapatan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan pendapatan berdasarkan SAK ETAP yaitu diakui ketika timbulnya hak rumah sakit rumah sakit atas penerimaan pendapatan.

3. Pengukuran

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 diukur sebesar nilai bruto, sama dengan kebijakan yang peneliti rekomendasikan diukur sebesar nilai wajar atas sesuai atas besaran pendapatan yang harus diterima. Hal tersebut telah sesuai dengan kebijakan pengukuran pendapatan dalam SAK ETAP yaitu diukur sebesar nilai wajar tidak termasuk adanya diskon atau potongan-potongan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian pendapatan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dalam laporan operasional adalah sebesar nilai bruto sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran-pengeluaran. Sama halnya dengan penyajian pendapatan menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan sesuai pada SAK ETAP yaitu menyajikan pendapatan sebesar nilai wajar yang tidak termasuk di dalamnya diskon maupun potongan-potongan.

4.5.5 Beban

4.5.5.1 Beban Pegawai

1. Definisi

Definisi beban pegawai yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan definisi beban pegawai menurut SAK ETAP yaitu beban yang ditanggung rumah sakit sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang dilakukan oleh pegawai rumah sakit.

2. Pengakuan

Pengakuan beban pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan beban pegawai berdasarkan SAK ETAP yaitu diakui ketika muncul kewajiban rumah sakit untuk membayar gaji pegawai .

3. Pengukuran

Pengukuran beban pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan SAK ETAP terkait aturan beban pegawai atau imbalan kerja yaitu diukur sebesar nilai bruto yang diperkirakan akan dibayarkan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian beban pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dalam laporan operasional telah sesuai dengan aturan pada SAK ETAP yaitu disajikan sebesar nilai bruto yang akan dibayarkan sebagai imbalan kerja.

4.5.5.2 Beban Barang dan Jasa

1. Definisi

- a. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 beban barang dan jasa meliputi beban atas pemakaian atau konsumsi barang dan jasa untuk kegiatan operasional. Sedangkan dalam kebijakan yang peneliti rekomendasikan, beban untuk kegiatan operasional khususnya barang dan jasa akan diklasifikasikan lagi atas beban barang dan jasa berdasarkan yang akan menghasilkan pendapatan dari kelangsungan usaha dan beban yang hanya sebatas kegiatan operasional yang tidak menghasilkan pendapatan.
- b. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 masih belum menyajikan aturan terkait dengan beban atas kerugian penurunan/kehilangan/penghapusan persediaan sebab dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 menyatakan bahwa jika terjadi penurunan nilai persediaan tidak dilaporkan di neraca, melainkan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2. Pengakuan

Pengakuan beban barang dan jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan aturan terkait pengakuan beban berdasarkan SAK ETAP yaitu diakui ketika muncul kewajiban rumah sakit untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa.

3. Pengukuran

Pengukuran beban barang dan jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan SAK ETAP terkait aturan beban yaitu diukur sebesar nilai bruto yang akan dibayarkan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian beban barang dan jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan SAK ETAP terkait aturan beban yaitu disajikan sebesar nilai bruto yang akan dibayarkan.

4.5.5.3 Beban Penyisihan Piutang

1. Definisi

Definisi beban penyisihan piutang menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan definisi menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan yaitu beban yang timbul atas piutang yang disisihkan dari nominal piutang sebenarnya.

2. Pengakuan

Pengakuan beban penyisihan piutang menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah ketika piutang benar-benar tidak dapat tertagih sebab metode yang digunakan adalah metode langsung. Sedangkan dalam kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah mengakui beban penyisihan piutang pada tiap akhir periode akuntansi tanpa menunggu pihak terutang tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, sebab metode penyisihan piutang yang digunakan dalam kebijakan tersebut adalah metode penyisihan yang menghitung penyisihan

piutang tidak tertagih tanpa menunggu pihak terutang tidak sanggup membayar kewajibannya.

3. Pengukuran

Pengukuran beban penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan pengukuran pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan yaitu diukur sebesar hasil perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan skedul umur piutang setiap akhir periode akuntansi.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian beban penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 sama dengan penyajian yang ada pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan yaitu sebesar nilai estimasi hasil perhitungan penyisihan piutang.

4.5.5.4 Beban Penyusutan

1. Definisi

Definisi beban penyusutan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan definisi penyusutan dalam kebijakan yang peneliti rekomendasikan yang mengacu pada SAK ETAP yaitu alokasi dari nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

2. Pengakuan

Pengakuan beban penyusutan dalam aturan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan pengakuan penyusutan

dalam SAK ETAP yaitu diakui pada akhir periode pelaporan yang dihitung sejak aset tetap siap untuk digunakan.

3. Pengukuran

Pengukuran beban penyusutan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan pengukuran penyusutan pada SAK ETAP yaitu menggunakan metode garis lurus.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian beban penyusutan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 telah sesuai dengan bentuk penyajian beban penyusutan pada SAK ETAP yaitu sebesar hasil perhitungan dari nilai aset tetap yang disusutkan dalam laporan operasional.

4.5.5.5 Beban Kerugian Penurunan/Kehilangan/Penghapusan Persediaan

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 masih belum terdapat aturan terkait beban kerugian penurunan/kehilangan/penghapusan persediaan, sehingga kebijakan yang peneliti rekomendasikan baru dibuat dengan menyesuaikan kondisi rumah sakit.

4.5.5.6 Beban Kerugian Penurunan/Kehilangan/Penghapusan Aset Tetap

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 masih belum terdapat aturan terkait dengan beban kerugian penurunan/kehilangan/penghapusan aset tetap, sehingga kebijakan yang peneliti rekomendasikan baru dibuat dengan menyesuaikan kondisi rumah sakit.

4.6 Desain Laporan Keuangan RSJ Menur Berdasarkan SAK

4.6.1 Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Pada BLUD, tujuan utama neraca yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLUD meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Format Desain Neraca untuk RSJ Menur:

Tabel 4.5
Format Desain Neraca RSJ Menur
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
Neraca
Per 31 Desember 20X1

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	<u>ASET LANCAR</u>		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Piutang		
5	Persediaan		
6	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka		
7	Uang Muka Pengadaan		
8	<u>ASET TETAP</u>		
9	Tanah		
10	Peralatan dan Mesin		
11	Gedung dan Bangunan		
12	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
13	Aset Tetap Lainnya		
14	Konstruksi dalam Pengerjaan		
15	<u>ASET LAIN-LAIN</u>		
16	Aset Lain-lain		

17	<u>ASET TIDAK BERWUJUD</u>		
18	Aset Tidak Berwujud		
19	<u>AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP</u>		
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
21	<u>AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA</u>		
22	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
23	<u>AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD</u>		
24	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
25	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		
26	TOTAL ASET		
27	UTANG		
28	<u>UTANG JANGKA PENDEK</u>		
29	Utang Usaha		
30	Utang Beban		
31	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
32	Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang		
33	Utang Jangka Pendek Lainnya		
34	<u>UTANG JANGKA PANJANG</u>		
35	Utang Jangka Panjang		
36	<u>PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA</u>		
37	Pendapatan Diterima Dimuka		
38	TOTAL UTANG		
39	EKUITAS		
40	EKUITAS TIDAK TERIKAT		
41	Ekuitas Tidak Terikat		
42	Surplus/Defisit		
43	Koreksi atau Penyesuaian atas Ekuitas		
44	TOTAL EKUITAS		
45	TOTAL UTANG/EKUITAS		

4.6.2 Laporan Operasional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menyebutkan laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas (baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan) yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari entitas tersebut yang penyajiannya disandingkan dengan periode

sebelumnya. Laporan operasional disusun berdasarkan basis akrual, oleh sebab itu laporan operasional memiliki keterkaitan dengan laporan perubahan ekuitas dan neraca dalam penyusunannya. Pada SAK ETAP, laporan operasional merupakan laporan laba rugi sebab pos-pos yang tersaji antara laporan operasional dan laporan laba rugi memiliki kesamaan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.6

Pos-Pos pada Laporan Operasional dan Laporan Laba Rugi

Laporan Operasional Pergub Jawa Timur nomor 2 tahun 2017	Laporan Laba Rugi pada SAK ETAP
1. Pendapatan-LO	1. Pendapatan
2. Beban	2. Beban keuangan
3. Surplus/defisit dari operasi	3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
4. Kegiatan non operasional	4. Beban pajak
5. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	5. Laba atau rugi netto
6. Pos luar biasa	
7. Surplus/defisit-LO	

Format desain laporan operasional untuk RSJ Menur:

Tabel 4.7

Format Desain Laporan Operasional RSJ Menur

RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Laporan Operasional

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	(Kenaikan/ Penurunan)	(%)
PENDAPATAN				
Pendapatan Operasional				
Pend. Op BLUD dari PL Kesehatan				
Pend. Op BLUD dari Hibah Tidak				

Terikat				
Pend. Op BLUD dari Kegiatan Fungsional Lainnya				
Pend. dari Ins. Pemerintah Vertikal				
Penyesuaian Pendapatan Klaim				
Pendapatan Non Operasional				
Pendapatan Non Operasional				
Jumlah Pendapatan LO				
BEBAN				
Beban Op. dari Kegiatan PL				
Beban Pegawai Pelayanan				
Beban Bahan				
Beban Jasa Pelayanan				
Beban Pemeliharaan Pelayanan				
Beban Barang dan Jasa Pelayanan				
Beban Op. dari Kegiatan UA				
Beban Pegawai UA				
Beban Administrasi Kantor				
Beban Promosi				
Beban Pemeliharaan UA				
Beban Barang dan Jasa UA				
Beban Umum dan Adm Lainnya				
Beban Non Operasional				
Beban Adm Transaksi Keuangan				
Beban Bunga				
Beban Adm dan Pengelolaan Piutang				
Beban Penyisihan Piutang				
Beban Kerugian Penurunan/Kehilangan/Penghapusan Persediaan				
Beban Kerugian Penurunan/Kehilangan/Penghapusan Aset Tetap				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT LO				

4.6.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE berdasarkan SAK ETAP (revisi 2011) adalah laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung

dalam ekuitas pada periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada periode, dan (tergantung format laporan perubahan ekuitas yang dipilih entitas) jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik selama periode. Tujuan dari LPE yaitu menyediakan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada RSJ Menur menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal

Ekuitas awal milik RSJ Menur dibentuk berdasarkan ketetapan keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/442/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Menur sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga dalam pembentukan ekuitas awal yang merupakan selisih aset dan kewajiban RSJ Menur pada saat rumah sakit tersebut ditetapkan sebagai BLUD.

2. Ekuitas donasi

Ekuitas donasi di RSJ Menur merupakan ekuitas berupa sumber daya yang diperoleh dari pemerintah atau donatur untuk digunakan dalam aktivitas operasional rumah sakit.

3. Surplus/defisit pada LPE merupakan selisih antara selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan pula surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

4. Koreksi-koreksi atau penyesuaian atas ekuitas merupakan hasil dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan efek menambah/mengurangi ekuitas sebagai

akibat dari penyesuaian ekuitas maupun dampak dari perubahan kebijakan rumah sakit.

5. Ekuitas akhir merupakan hasil akhir dari perhitungan ekuitas tahun berjalan rumah sakit dimana nilainya diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal dan ekuitas donasi dan surplus/defisit yang kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi atau penyesuaian.

Format desain laporan perubahan ekuitas untuk RSJ Menur:

Tabel 4.8

Format Desain Laporan Perubahan Ekuitas RSJ Menur

RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal		
2	Ekuitas Donasi		
3	Surplus/defisit tahun berjalan		
4	Surplus/defisit tahun sebelumnya		
5	Koreksi atau Penyesuaian atas Ekuitas		
6	Ekuitas Akhir		

4.6.4 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas berdasarkan pada SAK ETAP mengatur bahwa dalam penyajiannya dibagi sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan arus kas entitas. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Pada Laporan Arus Kas, arus kas akan dibedakan menjadi

arus masuk kas dan arus keluar kas yang dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

Berikut adalah contoh format Laporan Arus Kas RSJ Menur:

Tabel 4.9

Format Desain Laporan Arus Kas RSJ Menur

RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Operasional BLUD		
4	Pendapatan Instansi Vertikal		
5	Pendapatan Hibah		
6	Penyesuaian Pendapatan Klaim		
7	Jumlah Arus Kas Masuk		
8	Arus Keluar Kas		
9	Belanja Pegawai		
10	Belanja Barang dan Jasa		
11	Belanja Jasa Layanan		
12	Belanja Jasa Non Pelayanan		
13	Jumlah Arus Kas Keluar		
14	<i>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</i>		
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
16	Arus Masuk Kas		
17	Pendapatan Penjualan Aset Tetap		
18	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya		
19	Jumlah Arus Kas Masuk		
20	Arus Keluar Kas		
21	Belanja Aset Tetap		
22	Belanja Aset Tidak Berwujud		
23	Belanja Aset Lainnya		
24	Konstruksi dalam Pengerjaan		
25	Jumlah Arus Kas Keluar		
26	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		
27	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
28	Arus Masuk Kas		
29	Pencairan Dana Cadangan		

30	Penerimaan Dana APBN		
31	Penerimaan Dana APBD		
32	Penerimaan Dana BLUD		
33	Pinjaman Dalam Negeri		
34	Penerimaan Kembali Pinjaman		
35	Jumlah Arus Kas Masuk		
36	Arus Keluar Kas		
37	Pembentukan Dana Cadangan		
38	Penyertaan Modal Pemerintah		
39	Pembayaran Pokok Pinjaman		
40	Pemberian Pinjaman		
41	Jumlah Arus Kas Keluar		
42	<i>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</i>		
43	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
44	Arus Masuk Kas		
45	Penerimaan Sisa UYHD Tahun Lalu		
46	Penerimaan Sisa UYHD Tahun Berjalan		
47	Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran		
48	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
49	Jumlah Arus Kas Masuk		
50	Arus Keluar Kas		
51	Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran		
52	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
53	Jumlah Arus Kas Keluar		
54	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</i>		
55	Kenaikan/Penurunan Kas		
56	Saldo Awal Kas di BLUD		
57	Saldo Kas Lainnya		
58	Saldo Akhir Kas di BLUD (55+56+57)		
59	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		
60	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
61	Saldo Akhir Kas (59+60)		

Penjelasan dari masing-masing aktivitas adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan dan pengeluaran kas untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

2. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
4. Aktivitas Transitoris/Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4.7 Kebijakan Akuntansi SAK RSJ Menur

4.7.1 Aset

4.7.1.1 Aset Lancar

A. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di RSJ Menur yang sangat likuid yang bisa bersumber dari dana APBD, dana BLUD, maupun dana APBN. Kas dan Setara Kas akan diakui sebagai kas jika memenuhi definisi sebagaimana yang dimaksud kas dan setara kas. Pengakuan kas dan setara kas adalah ketika kas tersebut sudah diterima atau ketika sejumlah yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan disajikan sebesar nilai nominal dari kas dan setara kas tersebut. Kas dan setara kas yang dimaksud juga termasuk kas dari investasi jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan. Kas dan Setara Kas yang diterima dalam bentuk

valuta asing, akan disajikan dengan mata uang rupiah yang telah disesuaikan dengan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah yang berlaku pada tanggal transaksi. Adapun Kas dan Setara Kas di RSJ Menur terdiri atas:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
- d. Kas di Kas Daerah
- e. Kas di Bank

B. Piutang

Piutang merupakan hak rumah sakit untuk menerima pembayaran atas kegiatan maupun fungsi pelayanan yang telah dilakukan. Klasifikasi piutang yang ada di RSJ Menur dibedakan menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Piutang Pendapatan Jasa Layanan BLUD
 - a. Piutang Pasien Umum
 - b. Piutang Pasien dengan Penjamin Kesehatan
2. Piutang Pendapatan Hasil Pemanfaatan Aset BLUD
3. Piutang Pendapatan Pengembalian Belanja BLUD
4. Akumulasi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Piutang diakui ketika barang atau jasa diserahkan kepada pihak penerima utang walaupun belum menerima pembayaran atas penyerahan barang atau jasa tersebut. Piutang yang dimiliki rumah sakit akan menjadi berkurang jika dilakukan pembayaran oleh pihak yang mempunyai utang terhadap rumah sakit atau berkurang ketika dilakukannya penghapusan piutang. Apabila setelah

dilakukan penghapusan piutang terjadi pembayaran atas piutang yang dihapuskan, maka piutang tersebut dimunculkan kembali sebagaimana pelunasan piutang. Adapun metode penghapusan piutang yang tidak tertagih adalah dengan menggunakan metode penyisihan (*allowance method*) yaitu setiap penghapusan piutang tidak tertagih didebit ke akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, bukan ke akun Piutang Tidak Tertagih.

Penyajian piutang pada laporan keuangan adalah sejumlah seluruh tagihan piutang setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Sehingga dengan hal ini, piutang akan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase pendapatan. Penentuan umur piutang ditentukan dari tanggal faktur ke tanggal per 31 Desember. Pengelompokan umur piutang didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. s/d 1 tahun : 0%
- b. >1 s/d 2 tahun : 10%
- c. >2 s/d 3 tahun : 50%
- d. >3 tahun : 100%

C. Persediaan

Persediaan adalah aset berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang bisa bersumber dari dana APBD, dana BLUD, maupun dana APBN. Macam persediaan yang ada di RSJ Menur dibagi menjadi dua kelompok besar antara lain persediaan medis dan non medis dengan rincian sebagai berikut:

1. Persediaan medis:

- a. Persediaan Bahan Obat-obatan/Obat-obatan
- b. Persediaan Bahan Kimia
- c. Persediaan Alat Kesehatan Pakai Habis
- d. Persediaan Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran

2. Persediaan non medis:

- a. Persediaan Alat Tulis Kantor
- b. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik
- c. Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
- d. Persediaan Cenderamata/Souvenir
- e. Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis
- f. Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
- g. Persediaan Bahan Baku Bangunan
- h. Persediaan Barang Praktek dan Percontohan
- i. Persediaan Cetak dan/atau Penggandaan
- j. Persediaan Pakaian Kerja Lapangan
- k. Persediaan Pakaian Khusus

RSJ Menur mengakui persediaan ketika barang telah diterima atau dihasilkan dan akan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluwarsa, dan rusak. Bagi persediaan yang bersifat non medis, ketika persediaan keluar dari gudang non medis akan diakui sebagai persediaan pakai habis. Begitu pula untuk persediaan medis yang sudah keluar dari gudang medis akan dianggap sebagai persediaan pakai habis walaupun persediaan tersebut bersifat *ready on stock* yaitu persediaan yang harus selalu ada untuk bagian unit laboratorium, kesehatan lingkungan, radiologi, elektromedik, metadon, apotek depo, dan ruang rawat inap.

Persediaan di RSJ Menur dinilai sebesar biaya perolehan apabila persediaan didapatkan dengan cara dibeli dan untuk persediaan yang diperoleh dari donasi akan dinilai sebesar nilai wajarnya. Ketika persediaan akan digunakan atau dijual maka harga yang berlaku untuk persediaan tersebut adalah sesuai dengan hasil perhitungan *software* avisen yang dalam perhitungannya telah disesuaikan dengan persentase pada SK Direktur. Adapun perhitungan persediaan akan dilakukan secara perpetual baik untuk persediaan medis maupun non medis untuk memudahkan pengawasan terutama terhadap barang medis yang memiliki tanggal kadaluwarsa dan persediaan medis yang harus *ready on stock* di masing-masing instalasi.

D. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah hak yang seharusnya diperoleh oleh rumah sakit dari entitas lain atas sejumlah uang yang dibayarkan kepada suatu entitas untuk memperoleh manfaat atas fungsi dari biaya tersebut. Beban Dibayar Dimuka pada RSJ Menur antara lain terdiri dari Asuransi Kendaraan, Asuransi

Gedung dan Bangunan, dan Iuran Keanggotaan. Beban Dibayar Dimuka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran sesuai dengan nilai polis asuransi dan nilai iuran keanggotaan dan diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas jasa yang diterima dan disajikan sebesar nilai nominal atas polis asuransi atau iuran yang dibayarkan.

E. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dilakukan rumah sakit dengan kepemilikan selama 12 bulan atau kurang dengan tujuan agar investasi tersebut dapat segera dicairkan ketika dibutuhkan. Pada RSJ Menur bentuk investasi jangka pendek berupa Deposito Berjangka. Deposito Berjangka atau Investasi Jangka Pendek RSJ Menur diakui sebesar nilai nominal yang tercantum pada Bilyet atas nama RSJ Menur dan bunga atas deposito akan diakui sebagai Pendapatan Bunga RSJ Menur. Dalam pengambilan uang deposito, rumah sakit harus melakukannya sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan dengan pihak bank, jika tidak maka rumah sakit akan dikenakan *penalty* yang diakumulasikan menjadi beban bunga dan mengurangi angka nominal saldo pada bilyet.

F. Uang Muka

Uang Muka merupakan uang yang diserahkan terlebih dahulu kepada pihak rekanan sebagai bentuk tanda jadi diadakannya pengadaan atau pembelian barang dan jasa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan uang muka adalah pada saat terjadinya pembayaran kas kepada pihak rekanan dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak rekanan. Uang muka pembelian barang/jasa akan berkurang pada saat barang/jasa telah

diterima rumah sakit dan untuk uang muka kegiatan akan berkurang ketika telah dipertanggungjawabkan. Uang muka disajikan sebesar nilai nominalnya dalam kelompok aset lancar pada neraca (jika pada akhir periode akuntansi rumah sakit belum menerima barang dan jasa yang dibayar dengan uang muka) sesuai dengan uang muka yang diserahkan kepada pihak rekanan ketika melakukan pengadaan.

4.7.1.2 Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki RSJ Menur berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; aset tetap lainnya (koleksi buku, barang seni budaya, sejarah, dan lain-lain). Aset tetap tersebut diperoleh melalui dana APBD, dana BLUD, serta dana APBN. Aset tetap diakui ketika suatu aset memenuhi definisi sebagai aset tetap yaitu dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Aset tetap diakui sebagai milik rumah sakit pada saat aset tetap bersangkutan telah berpindah kepemilikan secara hukum menjadi milik rumah sakit. Aset tetap akan diukur sebesar harga perolehannya, untuk pengukuran setelah pengakuan awal maka aset tetap akan diukur sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Selain itu, rumah sakit juga harus mengakui biaya pemeliharaan sehari-hari aset tetap sebagai beban dalam laporan operasional. Adapun metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus yang dihitung secara otomatis melalui *software* SIMBADA.

A. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan merupakan sejumlah pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan yang diadakan guna meningkatkan fungsi pelayanan RSJ

Menur yang dalam perolehan dananya dapat bersumber dari dana APBD, dana BLUD, maupun dana APBN. Konstruksi dalam Pengerjaan akan diakui pada setiap termin dilakukannya pekerjaan konstruksi menggunakan perhitungan persentase penyelesaian, jika pekerjaan tersebut telah selesai maka konstruksi dalam pengerjaan akan diakui sebagai aset tetap milik rumah sakit. Pengukuran nilai konstruksi dalam pengerjaan adalah sebesar nilai kontrak atas konstruksi. Praktik penggunaan nilai kontrak sebagai pengukuran yang dapat diterapkan di RSJ Menur yaitu menggunakan kontrak harga tetap. Kontrak harga tetap merupakan perjanjian kontrak antara pihak rumah sakit dengan kontraktor/rekanan yang menyetujui nilai kontrak yang telah ditetapkan. Ketika dilakukannya kontrak konstruksi, rumah sakit akan melakukan peninjauan kepada kontraktor-kontraktor dengan mencari penawaran biaya yang rendah melalui perhitungan harga perkiraan sementara oleh pihak rumah sakit. Umumnya, peninjauan akan dilakukan pada dua kontraktor untuk dipilih mana yang memberikan penawaran biaya terendah. Dalam penyajiannya, Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan sebesar persentase penyelesaiannya di tiap periode akuntansi. Konstruksi dalam Pengerjaan yang telah terealisasi 100% akan diklasifikasikan sebagai aset tetap. Walaupun sebelum terealisasi menjadi aset tetap, Konstruksi dalam Pengerjaan tetap diklasifikasikan sebagai aset tetap sesuai pada aturan dalam PSAK 16 tentang aset tetap yaitu dengan membebankan biaya yang dikeluarkan atas Konstruksi dalam Pengerjaan sampai menjadi aset tetap.

B. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan satu kesatuan jenis aset tetap selain yang didefinisikan sebagai aset tetap pada poin diatas yang dalam perolehannya bisa bersumber dari dana APBD, dana BLUD, maupun dana APBN. Aset Tetap Lainnya juga memiliki peran penting dalam kegiatan operasional RSJ Menur, adapun Aset Tetap Lainnya yang dimiliki RSJ Menur meliputi:

1. Koleksi terbitan/perpustakaan buku
2. Barang bercorak seni
3. Barang budaya
4. Alat olahraga

4.7.1.3 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan minim wujud fisik yang memiliki nilai ekonomis di masa depan yang bisa bersumber dari dana APBD, dana BLUD, maupun dana APBN. Di RSJ Menur, aset tidak berwujud berupa *software* SIM KES Rumah Sakit. Aset Tidak Berwujud diakui sebesar biaya perolehan atas Aset Tidak Berwujud seperti ketika rumah sakit mengeluarkan biaya untuk perolehan *software* SIM KES rumah sakit, maka biaya tersebut yang disebut sebagai biaya perolehannya. Setelah pengakuan awal, rumah sakit tidak mengakui pengeluaran yang sebelumnya adalah beban atas bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud untuk pengakuan aset tidak berwujud pada kemudian hari. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tidak berwujud adalah sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Sesuai pada peraturan SAK ETAP menyatakan bahwa semua aset tidak berwujud dianggap memiliki umur yang terbatas. Apalagi aset tidak berwujud yang ada di RSJ Menur adalah berupa *software* yang sudah pasti memiliki umur terbatas sebab sifat *software* pada kenyataannya tidak ada yang bersifat selamanya melainkan perlu adanya pembaruan. Dalam hal ini RSJ Menur tidak wajib untuk setiap periode mengukur masa manfaat (amortisasi) dari aset tidak berwujud apakah tergolong aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas atau tidak terbatas yang mengacu pada SIMBADA selaku *software* dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melainkan menggunakan SIMBADA sebagai pengukur amortisasi umur aset tidak berwujud. Jika umur aset tidak berwujud sulit untuk diestimasikan, maka secara otomatis aset tidak berwujud tersebut dianggap memiliki umur manfaat 10 tahun. Penyajian Aset Tidak Berwujud dalam laporan keuangan disajikan secara terpisah dengan Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud. Namun, seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan jika suatu saat RSJ Menur memiliki aset tidak berwujud dengan umur yang tidak terbatas. Sehingga pengukuran setelah pengakuan awal yang dilakukan atas aset tidak berwujud yang umurnya tidak terbatas tersebut adalah dengan melakukan penilaian atas penurunan nilai aset tidak berwujud bersangkutan.

4.7.1.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan perhitungan pola penggunaan atas aset tidak berwujud untuk mengestimasi aset tidak berwujud yang memiliki umur terbatas atau yang tidak terbatas. Pada kebijakan ini, sesuai dengan SAK ETAP untuk aset tidak berwujud dikategorikan sebagai aset tidak

berwujud dengan umur manfaat yang terbatas, untuk aset tidak berwujud yang sulit diestimasi umur manfaatnya akan otomatis dianggap memiliki umur manfaat 10 tahun. Pengakuan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud diakui sebesar setiap akhir periode akuntansi yang diukur berdasarkan nilai konsumsi atas aset tidak berwujud bersangkutan menggunakan *software* SIMBADA milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyajian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada laporan keuangan adalah sebesar nilai hasil pengukuran amortisasi pada periode bersangkutan. Namun, jika suatu saat RSJ Menur memiliki aset tidak berwujud dengan umur yang tidak terbatas maka pengukuran setelah pengakuan awal yang dilakukan atas aset tidak berwujud yang umurnya tidak terbatas tersebut adalah dengan melakukan penilaian atas penurunan nilai aset tidak berwujud bersangkutan bukan melalui amortisasi.

4.7.2 Kewajiban/Utang

4.7.2.1 Utang Jangka Pendek

A. Utang Usaha

Utang usaha merupakan kewajiban yang dimiliki RSJ Menur yang memiliki keterkaitan dengan jalannya usaha baik berupa barang dan/atau jasa yang dapat direalisasikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan dan diharapkan dapat menjadi pendapatan bagi RSJ Menur. Adapun utang usaha di RSJ Menur antara lain:

1. Utang Usaha-Obat-obatan
2. Utang Usaha-Makanan dan Minuman Pasien
3. Utang Usaha-Bahan Kimia

4. Utang Usaha-Pengisian Tabung (Oksigen)

B. Utang Beban

Utang beban merupakan kewajiban yang timbul ketika rumah sakit telah menerima manfaat dari obyek utang namun belum membayar atas manfaat yang telah diterima tersebut. Utang beban di RSJ Menur diklasifikasikan sebagai utang beban untuk pelayanan (PL) dan utang beban untuk bagian umum dan administrasi (UA). Adapun rincian utang beban yang dimiliki RSJ Menur adalah:

1. Utang Beban Pegawai PL
2. Utang Beban Jasa Pelayanan PL
3. Utang Beban Barang dan Jasa PL
4. Utang Beban Pemeliharaan PL
5. Utang Beban Pelayanan Lain-lain
6. Utang Beban Pegawai UA
7. Utang Beban Administrasi Kantor UA
8. Utang Beban Barang dan Jasa UA
9. Utang Beban Pemeliharaan UA
10. Utang Beban Promosi UA
11. Utang Beban Umum dan Administrasi Lain-lain

C. Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga)

Utang perhitungan fihak ketiga atau selanjutnya disingkat Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul di RSJ Menur sebagai akibat adanya pemotongan dari pihak ketiga kepada pihak terutang (seperti potongan untuk iuran askes, potongan pajak, dan lain-lain). Pengakuan utang PFK adalah pada saat

rumah sakit belum membayar atau menyetor sejumlah nilai pemotongan dari pihak yang terhutang kepada pihak ketiga dengan pengukuran sebesar nilai yang terutang antara pihak rumah sakit dengan pihak ketiga.

D. Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang

Bagian lancar dari utang jangka panjang merupakan utang yang awalnya dikategorikan sebagai utang jangka panjang namun suatu ketika dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan. Pengakuan untuk bagian lancar dari utang jangka panjang yaitu ketika benar-benar telah dilakukan pembayaran atau penyelesaian atas utang jangka panjang dalam waktu dua belas bulan atau kurang yang diukur sebesar nilai nominal sejumlah besaran utang tersebut. Ketika utang jangka panjang ternyata mampu diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan atau kurang maka utang itu akan diakumulasikan menjadi utang jangka pendek sebagai bagian lancar dari utang jangka panjang yang disajikan sebesar nilai nominal jumlah utang yang telah dibayarkan.

E. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan bagian dari utang jangka pendek yang unsur-unsur di dalamnya tidak termasuk pada kategori utang usaha, utang beban, maupun bagian lancar dari hutang jangka panjang karena memiliki perbedaan karakteristik dari tiga kategori utang jangka pendek tersebut, namun masih diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua belas bulan atau kurang. Utang jangka pendek lainnya yang ada di RSJ Menur meliputi utang pembelian aset tetap, utang beban lain-lain, dan utang jangka pendek lainnya. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat rumah sakit menerima jasa/hak atas

barang/jasa namun masih belum dilakukan pembayaran atas hak/jasa yang telah diterima. Pengukuran utang jangka pendek lainnya adalah sebesar nilai nominal yang terhutang dan akan berkurang pada saat terjadi pembayaran atau penyelesaian oleh pihak rumah sakit.

4.7.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pembayaran uang muka oleh wajib bayar yang belum ada kontraprestasi dari RSJ Menur dan belum menjadi hak RSJ Menur. Pengakuan untuk pendapatan diterima dimuka adalah pada saat diterimanya pembayaran dari pihak wajib bayar kepada RSJ Menur melalui kas BLUD, sedangkan untuk penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka akan dimulai ketika kas diterima dan kewajiban telah diberikan. Pendapatan diterima dimuka diukur dan disajikan sebesar nilai nominal pendapatan yang diterima.

4.7.3 Ekuitas

Ekuitas yang ada di RSJ Menur tidak terbagi menjadi yang terikat maupun yang tidak terikat melainkan tetap sebagai ekuitas. Dalam PSAK 45 diatur bahwa aset neto atau ekuitas terbagi menjadi aset neto terikat dan tidak terikat, sedangkan klasifikasi ekuitas pada BLUD tidak ada yang terikat atau dalam arti penggunaan atas ekuitas tidak dibatasi. Hal tersebut dicantumkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit yang menyatakan bahwa ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional rumah sakit.

Pengakuan ekuitas RSJ Menur yaitu pada saat telah ditetapkan nilai kekayaan untuk RSJ Menur sebagai BLUD yang nantinya sebagai ekuitas awal rumah sakit. Selain hal itu, datangnya ekuitas dari sumbangan/bantuan donatur juga diakui menjadi milik RSJ Menur sebagai pos ekuitas donasi dalam laporan keuangan. Ekuitas diukur berdasarkan nilai nominal jumlah kekayaan yang diberikan kepada rumah sakit pada awal ditetapkan sebagai BLUD, untuk ekuitas donasi diukur berdasarkan nilai wajar atas aset sumbangan/bantuan yang diberikan donatur.

4.7.4 Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari dana APBD, dana APBN, maupun dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih RSJ Menur. Adapun pendapatan di RSJ Menur diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Suatu pendapatan dikategorikan menjadi pendapatan operasional jika pendapatan tersebut diperoleh dari aktivitas operasional rumah sakit. Sedangkan, pendapatan akan dikategorikan menjadi pendapatan non operasional jika pendapatan tersebut tidak berhubungan langsung dengan aktivitas operasional rumah sakit. Pendapatan Operasional RSJ Menur meliputi:

1. Pendapatan Operasional BLUD dari Pelayanan Kesehatan
2. Pendapatan Operasional dari Hibah Tidak Terikat
3. Pendapatan Operasional BLUD dari Kegiatan Fungsional BLUD Lainnya
4. Pendapatan Operasional BLUD dari Hibah Terikat
5. Pendapatan dari Instansi Pemerintah Vertikal (APBD & APBN)

6. Penyesuaian Pendapatan Klaim

Sedangkan untuk Pendapatan Non Operasional RSJ Menur meliputi:

1. Pendapatan Non Operasional yang berasal dari keuntungan penurunan/kehilangan/penghapusan aset tetap
2. Pendapatan Non Operasional Lainnya

4.7.4.1 Pendapatan Operasional BLUD dari Pelayanan Kesehatan dan Penyesuaian Pendapatan Klaim

Pendapatan Operasional BLUD dari Pelayanan Kesehatan merupakan pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pembayaran atas layanan ini dapat dilakukan dengan pembayaran tunai maupun menggunakan klaim (BPJS, Jamkesda, SPM, asuransi kesehatan, dan lain-lain). Pendapatan operasional dari pelayanan kesehatan RSJ Menur meliputi pendapatan pelayanan medik, pendapatan penunjang medik, dan pendapatan penunjang non medik. Dari ketiga komponen pendapatan tersebut, berikut adalah rincian dari masing-masing komponen:

Tabel 4.10

Rincian Jenis Pendapatan Operasional dari Pelayanan Kesehatan di RSJ Menur Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Medik	Penunjang Medik	Penunjang Non Medik
1. Pendapatan rawat inap	1. Pendapatan gizi	1. Pendapatan pelayanan diklat
2. Pendapatan rawat jalan	2. Pendapatan laboratorium	
3. Pendapatan UGD	3. Pendapatan	

	elektromedik dan radiologi 4. Pendapatan napza	
--	--	--

Pendapatan Operasional dari Pelayanan Kesehatan diakui ketika telah memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan menerima pendapatan atas jasa layanan yang telah dilakukan tersebut. Pasien yang melakukan pembayaran secara tunai sebagai pasien umum, akan diklasifikasikan sebagai pendapatan pelayanan kesehatan pasien umum. Untuk Pasien yang melakukan pembayaran dengan klaim kesehatan akan disesuaikan nantinya sebagai pendapatan klaim. Penyesuaian pendapatan klaim diakui ketika ada selisih lebih atau kurang antara pengajuan klaim versi tarif rumah sakit dengan tarif in a cbg's atau hasil verifikasi dari instansi penjamin yang disesuaikan dengan jenis atau unit layanan (rawat jalan, rawat inap, dan napza). Pasien umum yang masih belum bisa melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit akan diklasifikasikan sebagai piutang pasien umum. Sedangkan, pasien dengan klaim yang masih belum bisa melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit akan diklasifikasikan sebagai piutang pasien dengan penjamin kesehatan atau lain-lain yang sejenis dengan klaim yang disahkan. Dalam kepengurusan klaim, jika suatu saat terdapat kelebihan atau kesalahan pembayaran klaim oleh pihak penjamin maka RSJ Menur mengakui sebagai restitusi pembayaran klaim melalui bendahara pengeluaran pembantu (fungsional), dimana sebelumnya bendahara pengeluaran pembantu mengajukan permintaan dana kepada bendahara penerimaan untuk dapat melakukan restitusi

tersebut tanpa melibatkan akun belanja manapun melainkan menggunakan mutasi kas.

Pendapatan operasional dari pelayanan kesehatan diukur sebesar nilai wajar pendapatan yang diterima atas pelayanan jasa yang telah dilakukan (tidak termasuk potongan-potongan maupun diskon). Untuk pendapatan klaim akan diukur sebesar nilai nominal dari klaim.

4.7.4.2 Pendapatan Operasional Hibah

Pendapatan Operasional Hibah merupakan pendapatan diluar aktivitas operasional RSJ Menur yang diperoleh dari suatu pihak yang tidak mengharapkan pengembalian. Di RSJ Menur, pendapatan operasional dari hibah dibedakan menjadi dua jenis yaitu pendapatan operasional hibah tidak terikat dan terikat. Pendapatan operasional hibah tidak terikat merupakan pendapatan yang diperoleh dari seseorang atau institusi yang tidak dibatasi tujuan penggunaannya. Sedangkan, yang dimaksud dengan pendapatan operasional hibah terikat yaitu pendapatan yang diperoleh dari seseorang atau institusi dengan dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu saja. Pengakuan pendapatan hibah yang berupa barang akan diakui pada saat hak kepemilikan atas barang telah berpindah kepemilikan menjadi milik RSJ Menur. Sedangkan, apabila pendapatan hibah berupa uang maka akan diakui pada saat kas telah diterima oleh RSJ Menur. Untuk pengukuran pendapatan hibah yang berupa barang yaitu sebesar nilai wajar dari barang bersangkutan, dan untuk pendapatan hibah berupa uang adalah sejumlah uang kas yang diterima RSJ Menur.

4.7.4.3 Pendapatan dari Instansi Pemerintah Vertikal (APBD dan APBN)

Pendapatan dari instansi vertikal merupakan pendapatan yang diperoleh RSJ Menur berupa dana APBD yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dana APBN dari Pemerintah Pusat. Pendapatan ini diakui sebagai pemasukan kas untuk RSJ Menur ketika telah diterimanya sejumlah kas berupa dana APBD dan APBN melalui bendahara penerimaan. Pendapatan dari instansi vertikal diukur sebesar nominal uang kas yang diterima rumah sakit dan disajikan sebesar nilai nominalnya dalam laporan operasional.

4.7.4.4 Pendapatan dari Keuntungan Aset

Pendapatan dari Keuntungan Aset merupakan pendapatan yang diperoleh rumah sakit atas aset yang dilepaskan atau dijual dengan melakukan penilaian ulang akumulasi penyusutan aset yang dijual tersebut. Sebetulnya, dalam aturan SAK ETAP tidak memperkenankan penilaian ulang pada aset sebab prinsip yang digunakan pada SAK ETAP adalah prinsip biaya perolehan. Namun, Pengakuan atas pendapatan keuntungan aset yaitu ketika diterimanya surat keputusan dari tim penghapusan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pengukuran dari keuntungan aset tersebut adalah menggunakan nilai wajar dari keuntungan aset bersangkutan. Adapun penyajian pendapatan keuntungan aset sebesar jumlah uang yang diterima dari penghapusan atas aset.

4.7.5 Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi berupa arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas bersih RSJ Menur. RSJ Menur

mengklasifikasikan beban menjadi beban operasional dan beban non operasional. Beban operasional merupakan beban yang timbul dari aktivitas operasional rumah sakit atau aktivitas utama dalam memberikan pelayanan, sedangkan beban non operasional merupakan beban yang muncul dari aktivitas non operasional atau dengan kata lain tidak berhubungan dengan aktivitas utama rumah sakit.

4.7.5.1 Beban Operasional dari Kegiatan Pelayanan

A. Beban Bahan

Beban Bahan merupakan biaya yang harus ditanggung rumah sakit terkait dengan penggunaan bahan-bahan untuk kegiatan pelayanan yang meliputi beban bahan obat-obatan PL, beban bahan kimia PL, beban alat kesehatan habis pakai PL, beban makanan dan minuman pasien/penghuni asrama PL, dan beban pengisian gas PL. Beban Bahan diakui ketika rumah sakit harus mengeluarkan biaya untuk pemenuhan kebutuhan atas bahan-bahan yang dimaksud untuk kegiatan pelayanan yang diukur sebesar nilai nominal dari biaya yang timbul atas perolehan bahan-bahan tersebut dan disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai nominal biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan-bahan tersebut.

B. Beban Barang dan Jasa Pelayanan

Beban Barang dan Jasa Pelayanan merupakan biaya yang ditanggung atas penggunaan barang atau jasa yang ada di rumah sakit dalam memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang dan Jasa Pelayanan tersebut terdiri dari beban telepon/faksimili PL, beban air PL, beban listrik PL, beban peralatan dan perlengkapan olahraga pakai habis PL, beban barang praktek dan percontohan PL, beban sertifikat dan kalibrasi PL, beban jasa perijinan dan administrasi PL,

beban jasa pengujian laboratorium PL, beban jasa pemeriksaan pasien pada rumah sakit rujukan/dokter eksternal PL, beban jasa *cleaning service* PL, beban pemeriksaan kesehatan dan pengobatan PL, beban bahan makanan/sembako PL, beban pakaian khusus PL, beban servis kendaraan bermotor PL, beban pemeliharaan PL, beban pelayanan lainnya (beban perjalanan dinas dalam daerah PL dan beban perjalanan dinas luar daerah).

Beban Barang dan Jasa Pelayanan diakui ketika muncul biaya yang harus ditanggung oleh rumah sakit untuk memperoleh biaya atau jasa sebagai penunjang kegiatan pelayanan. Pengukuran beban barang dan jasa pelayanan adalah sebesar nilai nominal ketika beban berupa barang dan akan sebesar nilai kontrak jika berupa jasa dengan perjanjian kedua pihak antara rumah sakit dengan pihak yang berkepentingan untuk diberikan pelayanan. Adapun penyajian beban barang dan jasa dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai nominal jika berupa barang dan sebesar nilai kontrak jika berupa perjanjian jasa.

4.7.5.2 Beban Operasional dari Kegiatan Umum dan Administrasi

A. Beban Administrasi Kantor

Beban Administrasi Kantor merupakan biaya yang ditanggung rumah sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi kantor. Adapun beban administrasi kantor tersebut antara lain beban iuran keanggotaan UA, beban perjalanan dinas dalam daerah UA, dan beban perjalanan dinas luar daerah UA. Beban Administrasi Kantor diakui ketika timbul biaya sebagai akibat munculnya kebutuhan rumah sakit atas administrasi kantor yang diukur sebesar nilai nominal

sesuai dengan besaran keluarnya biaya untuk memenuhi kebutuhan administrasi kantor dan disajikan dengan nilai nominal tersebut pada laporan keuangan.

C. Beban Promosi

Beban promosi merupakan biaya yang ditanggung rumah sakit terkait kegiatan promosi atau publikasi dengan tujuan agar RSJ Menur dikenal oleh masyarakat luas dan sebagai media untuk menunjukkan kinerja mereka. Beban promosi diakui ketika rumah sakit diharuskan untuk mengeluarkan biaya dengan tujuan kepentingan promosi RSJ Menur yang diukur sebesar nilai nominal biaya yang dikeluarkan untuk keperluan promosi RSJ Menur sehingga dalam penyajiannya pada laporan keuangan adalah sebesar nilai nominal tersebut.

D. Beban Pemeliharaan Umum dan Administrasi

Beban Pemeliharaan Umum dan Administrasi merupakan biaya yang ditanggung rumah sakit untuk memelihara aset yang dimiliki. Beban pemeliharaan umum dan administrasi tersebut meliputi beban pemeliharaan peralatan dan mesin UA; beban pemeliharaan jalan, irigasi, instalasi dan jaringan UA; beban pemeliharaan gedung dan bangunan UA, beban pemeliharaan kepustakaan, kebudayaan, olahraga, dan hewan/tanaman; dan beban pemeliharaan aset tidak berwujud UA. Beban Pemeliharaan Umum dan Administrasi diakui ketika timbulnya beban yang harus ditanggung rumah sakit untuk membiayai pemeliharaan aset milik rumah sakit khususnya untuk bagian umum dan administrasi yang diukur sebesar estimasi biaya yang timbul atas pemeliharaan aset bersangkutan dan disajikan sebesar nilai nominal dari biaya atas pemeliharaan aset bersangkutan.

E. Beban Barang dan Jasa Umum Administrasi

Beban barang dan jasa umum administrasi merupakan biaya yang ditanggung rumah sakit dalam perihal pengeluaran untuk pembelian barang maupun jasa yang dapat membantu administrasi rumah sakit. Beban barang dan jasa umum administrasi diakui ketika muncul biaya yang harus ditanggung rumah sakit dalam upaya pemenuhan kebutuhan atas barang dan jasa sebagai penunjang kegiatan administrasi rumah sakit yang diukur sebesar nilai nominal atas biaya yang timbul dalam perolehan barang dan sebesar nilai kontrak perjanjian jika berupa jasa.

F. Beban Umum dan Administrasi Lainnya

Beban umum dan administrasi lainnya merupakan biaya yang ditanggung rumah sakit untuk menanggung penyusutan atas aset milik RSJ Menur serta beban yang memiliki karakteristik yang berbeda dari beban pegawai umum dan administrasi, beban administrasi kantor, beban pemeliharaan umum dan administrasi, beban darang dan jasa umum administrasi. Beban-beban yang dimaksud terdiri dari beban penyusutan aset tetap, beban penyusutan aset lain-lain, beban amortisasi aset tidak berwujud, dan beban operasional lain-lain. Beban umum dan administrasi lainnya diakui ketika timbul biaya yang harus ditanggung rumah sakit atas penyusutan aset yang ada di rumah sakit maupun biaya yang timbul atas aktivitas operasional lainnya. Pengukuran untuk beban umum dan administrasi lainnya adalah sebesar nilai penyusutan/amortisasi untuk aset bersangkutan dan sebesar nilai nominal biaya untuk beban operasional lain-lain.

4.7.5.3 Beban Non Operasional

A. Beban Administrasi Transaksi Keuangan

Beban administrasi transaksi keuangan merupakan biaya yang ditanggung rumah sakit untuk keperluan membantu proses jalannya transaksi keuangan. Beban administrasi transaksi keuangan diakui ketika timbulnya biaya yang harus ditanggung rumah sakit untuk keperluan transaksi keuangan yang diukur sebesar nilai nominal yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan.

B. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan biaya yang muncul sebagai akibat rumah sakit mengajukan pinjaman yang terdapat unsur bunga di dalamnya dan wajib ditanggung oleh pihak rumah sakit. Pengakuan beban bunga adalah pada saat beban tersebut timbul dari pengajuan pinjaman rumah sakit kepada pihak bank yang diukur perhitungan bunga melalui pengukuran besaran utang yang kemudian dihitung dengan tingkat persentase bunga atau beban bunga yang telah ditentukan dengan kebijakan yang dibuat kreditor.

C. Beban Administrasi dan Pengelolaan Piutang

Beban Administrasi dan Pengelolaan Piutang merupakan beban yang berkaitan dengan beban penyisihan piutang yang merupakan beban rumah sakit atas piutang yang disisihkan dari nominal piutang seharusnya. Beban penyisihan piutang diakui ketika munculnya transaksi piutang di rumah sakit yang diukur sebesar nilai hasil perhitungan penyisihan piutang yang tidak dapat tertagih dengan memperhitungkan melalui daftar umur piutang atau persentase

pendapatan. Penyajian beban penyisihan piutang adalah sebesar nilai estimasi piutang yang tidak tertagih atau hasil perhitungan penyisihan piutang.

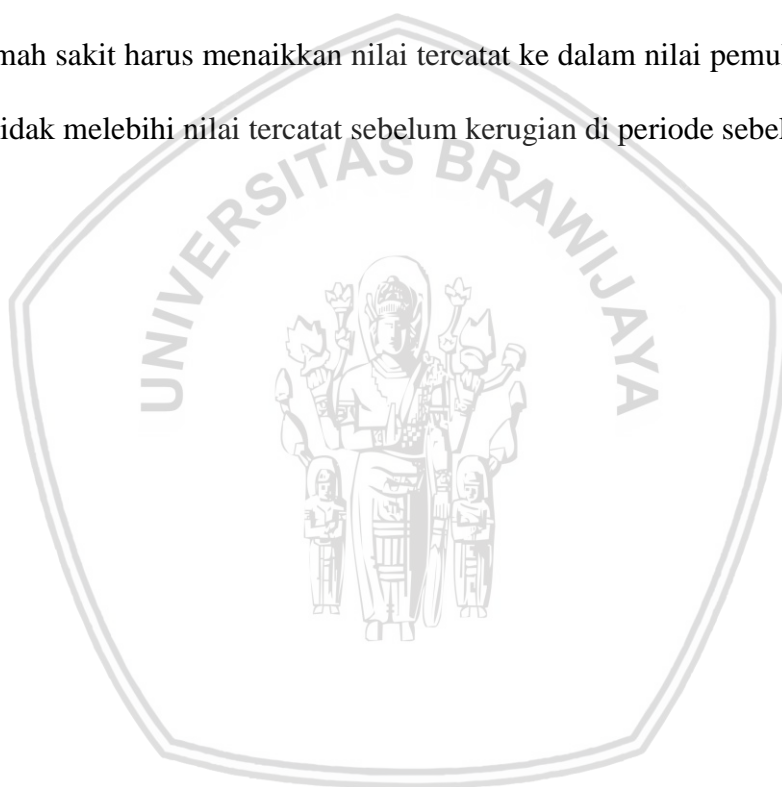
D. Beban Kerugian Penurunan/Kehilangan/Penghapusan Persediaan

Beban kerugian penurunan/kehilangan/penghapusan persediaan merupakan beban yang timbul sebagai akibat turunnya nilai persediaan karena mengalami kerusakan, keusangan, atau penurunan harga jual. Penurunan persediaan diakui ketika dilakukannya pengujian pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dan diukur sebesar harga jual dikurangi biaya yang digunakan untuk menjual atau menghapus persediaan serta turut mengakui nilai dari penurunan atas persediaan bersangkutan. Beban kerugian penurunan/kehilangan/penghapusan persediaan disajikan sebesar nilai neto dari penghitungan harga jual dikurangi biaya yang digunakan untuk menghapus atau menjual pada laporan operasional.

E. Beban Kerugian Kehilangan/Penghapusan Aset Tetap

Beban kerugian penurunan aset tetap adalah beban yang timbul sebagai akibat dari turunnya nilai tercatat aset tetap melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali oleh RSJ Menur. Beban kerugian penurunan aset tetap diakui ketika dilakukannya pengujian pada setiap tanggal pelaporan terhadap aset tetap. Beban kerugian penurunan aset tetap diukur secara otomatis oleh tim penilai aset tetap dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika aset tetap mengalami penurunan nilai maka otomatis harus dilakukan penyesuaian kembali atas umur manfaat aset tetap tersebut yang penyesuaiannya disesuaikan dengan kebijakan dari tim penilai aset tetap dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kerugian yang timbul sebagai

akibat dari penghapusan atau penjualan aset tetap harus segera diakui pada laporan operasional RSJ Menur. Setiap tanggal pelaporan, rumah sakit meninjau apakah masih terdapat kerugian penurunan nilai pada periode sebelumnya. Jika ada, maka rumah sakit akan mengestimasi nilai wajar aset yang mengalami penurunan dikurangi biaya untuk menjual atau yang disebut dengan nilai pemulihan. Apabila nilai lebih besar dari pemulihan nilai tercatat aset pada neraca maka rumah sakit harus menaikkan nilai tercatat ke dalam nilai pemulihan dengan batasan tidak melebihi nilai tercatat sebelum kerugian di periode sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada entitas pelaporan rumah sakit berstatus BLUD di RSJ Menur, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan keuangan yang dihasilkan RSJ Menur saat ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 sebagai kebijakan akuntansinya meliputi neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi yang dibuat peneliti disini adalah kebijakan akuntansi yang mengacu pada SAK ETAP, PSAK 45, serta referensi lainnya dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 sebagai pedoman akuntansi untuk BLU.
3. Perbedaan aturan terkait pada akun-akun di neraca pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dengan kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat tambahan akun kas di bank untuk kas dan setara kas pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan.
 - b. Mengakui penurunan nilai persediaan pada saat persediaan dihapuskan/rusak/usang yaitu mengurangi nilai persediaan pada neraca, sedangkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 hanya mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

- c. Metode penghapusan piutang tidak tertagih pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah menggunakan metode penyisihan sebagai bentuk preventif ketika piutang tidak dapat tertagih. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017, penghapusan piutang tidak tertagih dilakukan dengan metode langsung yang dilakukan ketika piutang benar-benar tidak dapat tertagih.
- d. Kebijakan beban dibayar dimuka pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan yaitu beban yang dibayarkan kepada suatu entitas yang selanjutnya akan diakui sebagai beban untuk memperoleh manfaat atas fungsi biaya tersebut. Beban dibayar dimuka meliputi asuransi kendaraan dibayar dimuka, asuransi gedung dan bangunan dibayar dimuka, dan iuran keanggotaan.
- e. Investasi jangka pendek pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan hanya berupa deposito berjangka di bawah 12 bulan sesuai dengan keadaan di lapangan. Sehingga bentuk investasi jangka pendek pada kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 berupa SBI, SUN, dan SPN tidak berlaku untuk diterapkan di RSJ Menur. Sebab investasi berupa SBI, SUN, dan SPN hanya berlaku untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- f. Terdapat tambahan akun uang muka pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan sebagai uang yang menjadikan tanda jadi diadakannya pengadaan atau pembelian barang jasa kepada pihak rekanan.

- g. Pengukuran aset tetap (kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan) setelah pengakuan awal yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, aturan ini masih belum dicantumkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017.
- h. Konstruksi dalam pengerjaan akan dilakukan melalui kontrak harga tetap dengan pengakuan setiap termin pengerjaan dengan metode persentase penyelesaian. Pada akhir periode akuntansi akan dihitung secara gabungan besaran total pengerjaan dari setiap termin.
- i. Pengukuran aset tidak berwujud pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah setiap aset tidak berwujud memiliki umur manfaat yang terbatas, sedangkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 mengklasifikasikan bahwa aset tidak berwujud ada yang memiliki umur manfaat terbatas dan tidak terbatas. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat RSJ Menur memiliki aset tidak berwujud dengan umur yang tidak terbatas, sehingga tidak dilakukan amortisasi melainkan dengan melakukan penilaian atas penurunan nilai aset tidak berwujud tersebut.
- j. Kewajiban jangka pendek untuk utang beban menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 meliputi biaya-biaya listrik, telepon, dan air; pegawai; jasa pelayanan; pembelian obat dan alat kesehatan pakai habis; biaya makan dan minuman pasien. Menurut kebijakan yang peneliti rekomendasikan, utang beban akan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya

antara lain utang usaha dan utang beban. Utang usaha merupakan utang yang memiliki keterkaitan dengan jalannya usaha, sedangkan utang beban merupakan utang yang timbul ketika rumah sakit telah menerima manfaat dari obyek utang tetapi belum membayar atas manfaat tersebut. Sehingga untuk pembelian obat dan alat kesehatan pakai habis serta biaya makan dan minuman pasien akan diklasifikasikan sebagai utang usaha. Sedangkan untuk biaya listrik, telepon, dan air; pegawai; jasa pelayanan akan diklasifikasikan sebagai utang beban.

4. Kebijakan ekuitas menurut aturan yang ada pada PSAK 45 disebutkan bahwa ekuitas terdiri dari ekuitas terikat dan tidak terikat. Pada entitas BLUD ekuitas tidak dibagi menjadi dua bagian, melainkan langsung diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak terikat saja. Sehingga untuk ekuitas tidak terikat didasarkan pada PSAK 45 melainkan mengikuti aturan yang tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 dengan merujuk pada PSAK 45 untuk ekuitas tidak terikat. Untuk pengukuran ekuitas mengikuti aturan SAK ETAP dengan pengukuran nilai historis dan nilai wajar. Nilai historis digunakan untuk menilai ekuitas awal sedangkan nilai wajar untuk mengukur ekuitas tidak terikat yang diterima rumah sakit selama tahun berjalan.
5. Perbedaan aturan terkait pada akun-akun di laporan operasional pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dengan kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan atau disebut juga pendapatan LO menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 terdiri dari dua kelompok besar yaitu pendapatan dari kegiatan operasional dan pendapatan dari kegiatan non operasional. Begitu pula dengan pendapatan yang ada pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan yang mengklasifikasikan meliputi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Hanya saja unsur pendapatan operasional/non operasional yang ada di Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 tidak sama dengan pendapatan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan. Pendapatan yang ada pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 sebagian besar berupa pendapatan dari pajak, bea balik nama, pendapatan denda, pendapatan fasilitas sosial, dan lain-lain. Sedangkan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan, pendapatan operasionalnya antara lain adalah pendapatan yang berhubungan dengan jalannya kegiatan usaha seperti pendapatan dari pelayanan kesehatan, kegiatan fungsional, pendapatan hibah, dan penyesuaian pendapatan klaim. Untuk pendapatan dari non operasional, antara Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 dan kebijakan yang peneliti rekomendasikan memiliki kesamaan yaitu pendapatan dari keuntungan penjualan atau penghapusan aset tetap. Hal yang membedakan lagi adalah pendapatan pemanfaatan aset non lancar, yang apabila pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 diklasifikasikan sebagai pendapatan non operasional, sedangkan pada kebijakan yang peneliti rekomendasikan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional

sebab aset yang dimanfaatkan tersebut berhubungan dengan fungsi operasional dari kegiatan fungsional.

- b. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017, beban barang dan jasa meliputi beban atas pemakaian atau konsumsi barang dan jasa untuk kegiatan operasional. Sedangkan dalam kebijakan yang peneliti rekomendasikan, beban untuk kegiatan operasional khususnya barang dan jasa akan diklasifikasikan lagi atas beban barang dan jasa berdasarkan yang akan menghasilkan pendapatan dari kelangsungan usaha dan beban yang hanya sebatas kegiatan operasional yang tidak menghasilkan pendapatan.
- c. Pengakuan beban penyisihan piutang menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2017 adalah ketika piutang benar-benar tidak dapat tertagih sebab metode yang digunakan adalah metode langsung. Sedangkan dalam kebijakan yang peneliti rekomendasikan adalah mengakui beban penyisihan piutang setiap akhir periode akuntansi.
- d. Terdapat beban kerugian penurunan/kehilangan/penghapusan persediaan dan aset tetap dimana kedua akun tersebut akan berhubungan dengan akun persediaan dan aset tetap pada neraca.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti selama melakukan penelitian ini adalah keterbatasan waktu dalam proses wawancara dengan informan. Keterbatasan ini dikarenakan waktu yang kurang tepat, yaitu pada saat jam kerja berlangsung, sehingga pegawai RSJ Menur sebagai informan dalam penelitian ini tidak dapat memberikan

informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Selain itu, peneliti tidak dapat mengetahui secara langsung bentuk praktek *software* SIMBADA dan Avisena yang digunakan RSJ Menur dikarenakan dibatasinya akses peneliti untuk tidak terlibat dengan penggunaan *software* tersebut. Peneliti hanya mengetahui informasi penggunaan *software* tersebut melalui informan ketika wawancara berlangsung.

5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan untuk RSJ Menur atas penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi RSJ Menur:
 - a. RSJ Menur perlu untuk merekrut pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi khususnya SAK agar penerapan penyusunan laporan keuangan rumah sakit berbasis SAK dapat segera dilaksanakan dengan maksimal.
 - b. Sebaiknya RSJ Menur segera memiliki kebijakan akuntansi internal dan menerapkannya paling tidak mulai tahun anggaran 2019 untuk memaksimalkan PPK-BLUD.
 - c. RSJ Menur perlu memperbarui sistem informasi manajemen yang dapat mempresentasikan kondisi rumah sakit berstatus BLUD agar penerapan akuntansi berbasis SAK dapat maksimal.

2. Bagi Peneliti selanjutnya:

- a. Hindari melakukan wawancara pada jam kerja pegawai agar informasi yang dihasilkan dapat lebih jelas dan tidak tergesa-gesa sehingga tidak perlu mengulang wawancara di hari berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2011). *Buletin Teknis 6: Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba*. Diakses dari <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-284>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Sektor Publik* (edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Imawan, M. R. (2016). *Analisis Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah untuk Menerapkan PPK-BLUD* (Skripsi, Universitas Brawijaya, Indonesia). Diakses dari <http://digilib.ub.ac.id>
- Jogiyanto, H. M. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Juan, N. E., & Wahyuni, E. L. (2014). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan* (edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Diakses dari www.depkes.go.id
- Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1981 tahun 2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU.
- Kusuma. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah* (Tesis, Universitas Diponegoro, Indonesia). Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/39563/>
- Martani, D., Veronica, S., Wardhani, T., Farahmita, A., Tanujaya, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurputri, Ida. (2016). *Analisis Kesiapan Internal Rumah Sakit Menuju Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU): Studi Kasus di RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang* (Tesis, Universitas Gajah Mada, Indonesia). Diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=106065&obyek_id=4
- Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman Organisasi Rumah Sakit.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang Entitas Nirlaba (revisi 2011).
- Profil Rumah Sakit Jiwa Menur. *Rumah Sakit Jiwa Menur Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. Diakses dari <http://rsjmenur.jatimprov.go.id/index.php/profil>
- Purba, M. P. (2013). *Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud: Isu-isu Kontemporer Terkait Pelaporan Keuangan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Sewa dan Hak Atas Tanah* (edisi 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan B. D., Lim, J., Tan, R. (2015). *Pengantar Keuangan Perusahaan Fundamentals of Corporate Finance Edisi Global Asia* (Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (6th edition). Penerbit: John Wiley.
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2009).
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor I (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005: Lampiran III).
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor XI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005: Lampiran XIII).
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (edisi 2). Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Weygandt, J.J., Kieso, D.E., Kimmel, P.D. (2007). *Accounting Principles* (edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.



Lampiran 1. Kode Akun RSJ Menur

Kode Akun						Nama Akun			
						Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
1	0	0	0	0	0	Aset			
1	1	0	0	0	0		Aset Lancar		
1	1	1	0	0	0			Kas dan Setara Kas	
1	1	1	0	1	1				Kas di Bank
1	1	1	0	2	2				Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	0	3	3				Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	0	4	4				Kas di Bendahara Peng. Pembt
1	1	1	0	5	5				Kas di Kas Daerah
1	1	2	0	0	0			Investasi Jang. Pendek	
1	1	2	0	1	1				Investasi Jangka Pendek
1	1	3	0	0	0			Piutang	
1	1	3	0	1	1				Piutang Pend Jasa Layanan BLUD
1	1	3	0	2	2				Piutang Pend Hasil Pmnfaatn Aset BLUD
1	1	3	0	3	3				Piutang Pend Pengembl Belanja BLUD
1	1	3	0	4	4				Akumulasi Penyisihan Piutang Pend BLUD
1	1	4	0	0	0			Persediaan	
1	1	4	0	1	1				Persediaan Bahan Obat-Obatan/Obat
1	1	4	0	2	2				Persediaan Bahan Kimia
1	1	4	0	3	3				Persediaan Alat Kes. Pakai Habis
1	1	4	0	4	4				Persediaan Peng Tabung Gas
1	1	4	0	5	5				Persediaan Alat Tulis Kantor
1	1	4	0	6	6				Persediaan Alat Listrik dan Elektronik
1	1	4	0	7	7				Persediaan Perlit dan Perlng RT
1	1	4	0	8	8				Persediaan Cenderamata/Souvenir
1	1	4	0	9	9				Persediaan Perlit dan Perln Og Pakai Habis

1	1	4	1	0				Persediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
1	1	4	1	1				Persediaan Bahan Baku Bangunan
1	1	4	1	2				Persediaan Barang Praktek dan Percontohan
1	1	4	1	3				Persediaan Cetak dan/atau Penggandaan
1	1	4	1	4				Persediaan Pakaian Kerja Lapangan
1	1	4	1	5				Persediaan Pakaian Khusus
1	1	5	0	0			B. Brg dan Jasa DDM	
1	1	5	0	1				Asuransi Gedung dan Bangunan Dibayar Dimuka
1	1	5	0	2				Asuransi Kendaraan Dibayar Dimuka
1	1	5	0	3				Iuran Kesehatan Dibayar Dimuka
1	1	6	0	0			Uang Muka	
1	1	6	0	1				Uang Muka
1	2	0	0	0		Aset Tetap		
1	2	1	0	0			Tanah	
1	2	1	0	1				Tanah untuk Bangunan Gedung
1	2	2	0	0			Peralatan dan Mesin	
1	2	2	0	1				Alat-alat Besar Darat
1	2	2	0	2				Alat-alat Bantu
1	2	2	0	3				Alat Angkutan Darat Bermotor
1	2	2	0	4				Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	2	2	0	5				Alat Bengkel Bermesin
1	2	2	0	6				Alat Bengkel Tak Bermesin
1	2	2	0	7				Alat Ukur
1	2	2	0	8				Alat Rumah Tangga
1	2	2	0	9				Komputer
1	2	2	1	0				Alat Studio
1	2	2	1	1				Alat Komunikasi
1	2	2	1	2				Peralatan Pemancar

1	2	2	1	3				Alat Kedokteran
1	2	2	1	4				Alat Kesehatan
1	2	2	1	5				Alat Laboratorium
1	2	2	1	6				Senjata Api
1	2	3	0	0			Gedung dan Bang	
1	2	3	0	1				Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	2	3	0	2				Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	2	4	0	0			Jalan, Irgs, dan Jaringan	
1	2	4	0	1				Jalan
1	2	4	0	2				Jembatan
1	2	4	0	3				Bangunan Air Irigasi
1	2	4	0	4				Instalasi Air Kotor
1	2	4	0	5				Jaringan Listrik
1	2	5	0	0			Aset Tetap Lainnya	
1	2	5	0	1				Buku
1	2	5	0	2				Barang-barang Perpustakaan
1	2	5	0	3				Barang Bercorak Kebudayaan
1	2	5	0	4				Alat Olahraga
1	3	0	0	0		Aset Lain-lain		
1	3	1	0	1			Aset Lain-lain	
1	4	0	0	0		Aset Tdk Berwujud		
1	4	1	0	0			Aset Tidak Berwujud	
1	5	0	0	0		Akm Peny. Aset Tetap		
1	5	1	0	0			Akm.Peny. Aset Tetap	
1	5	1	0	1				Akumulasi Peny. Peralatan dan Mesin
1	5	1	0	2				Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan
1	5	1	0	3				Akumulasi Peny. Jalan, Irigasi, dan Jar
1	5	1	0	4				Akumulasi Peny. Aset Tetap Lainnya

1	6	0	0	0		Akm.Peny.AsetLain-lain		
1	6	1	0	0			Akm. Peny. Aset Lain	
1	7	0	0	0		Akm. Amr Aset Tk Brw		
1	7	1	0	1			Akm.Amr AsetTk Brw	
2	0	0	0	0	Utang			
2	1	0	0	0		Utang Jangka Pendek		
2	1	1	0	0			Utang Usaha	
2	1	1	0	1				Utang Usaha Obat-obatan
2	1	1	0	2				Utang Usaha Makan Minum Pasien
2	1	1	0	3				Utang Usaha Bahan Kimia
2	1	1	0	4				Utang Usaha Pengisian Tabung
2	1	2	0	0			Utang Beban	
2	1	2	0	1				Utang Beban Pegawai PL
2	1	2	0	2				Utang Beban Bahan PL
2	1	2	0	3				Utang Beban Jasa Pelayanan PL
2	1	2	0	4				Utang Beban Barang dan Jasa PL
2	1	2	0	5				Utang Beban Pemeliharaan PL
2	1	2	0	6				Utang Beban Pelayanan Lain-lain
2	1	2	0	7				Utang Beban Pegawai UA
2	1	2	0	8				Utang Beban Administrasi Kantor UA
2	1	2	0	9				Utang Beban Barang dan Jasa UA
2	1	2	1	0				Utang Beban Pemeliharaan UA
2	1	2	1	1				Utang Beban Promosi UA
2	1	2	1	2				Utang Beban Umum dan Admin Lain-lain
2	1	3	0	0			Utang PFK	
2	1	3	0	1				Utang Perhitungan Fihak Ketika
2	2	0	0	0		Utang Jangka Panjang		
2	2	1	0	0			Utang Jangka Panjang	

2	2	1	0	1				Utang Jangka Panjang
2	3	0	0	0		Pend. DiterimaDimuka		
2	3	1	0	0			Pend.Diterima Dimuka	
2	3	1	0	1				Pendapatan Diterima Dimuka
3	0	0	0	0	Ekuitas			
3	1	0	0	0		Ekuitas Tidak Terikat		
3	1	1	0	0			E. Dana Pemkab/Kota	
3	1	2	0	0			E. Dana Pemprov	
3	1	3	0	0			E. Dana Pem. Pusat	
3	1	4	0	0			Koreksi Ekuitas	
4	0	0	0	0	Pendapatan			
4	1	0	0	0		Pendapatan Operasional		
4	1	1	0	0			PO BLUD Pel. Kes	
4	1	1	0	1				Pend. Pelayanan Medik
4	1	1	0	2				Pend. Rawat Inap
4	1	1	0	3				Pend. Rawat Jalan
4	1	1	0	4				Pend. UGD
4	1	1	0	5				Pend Pelayanan Penunjang Medik
4	1	1	0	6				Pend. Farmasi
4	1	1	0	7				Pend. Rehab Medik
4	1	1	0	8				Pend. Gizi
4	1	1	0	9				Pend. Laboratorium
4	1	1	1	0				Pend. Elektromedik dan Radiologi
4	1	1	1	1				Pend. Napza
4	1	1	1	3				Pend.Pelayanan Penunjang Non Medik
4	1	1	1	4				Pend. Pelayanan Diklat
4	1	1	1	5				Pend. Pelayanan Kesehatan Lainnya
4	1	2	0	0			PO BLUD Kerjasama	

4	1	2	0	1				Pend. Kerjs Pendidikan dan Pelatihan
4	1	2	0	2				Pend. Kerjs Penelitian
4	1	2	0	3				Pend. Kerjs Pengb. Produk Layanan
4	1	3	0	0			PO.Hibah Tdk Terikat	
4	1	3	0	1				Pend. Tidak Terikat Perseorangan
4	1	3	0	2				Pend. Tidak Terikat Institusional
4	1	4	0	0			PO. BLUD Keg. Fung	
4	1	4	0	1				Pend. Pemanfaatan Aset
4	1	4	0	2				Pend. Pemanfaatan Hasil BLUD
4	1	4	0	3				Pend. Jasa Keuangan
4	1	4	0	4				Pend. Jasa Giro BLUD
4	1	4	0	5				Pend. Komisi
4	1	4	0	6				Pend. Penerimaan Potongan BLUD
4	1	4	0	7				Pend. Pengembalian Belanja BLUD
4	1	4	0	8				Pend. BLUD Hasil Penj. Kekayaan
4	1	4	0	9				Penghapusan Aset BLUD
4	1	4	1	0				Penghapusan Persediaan
4	1	5	0	0			Pend. Instansi Vertikal	
4	1	5	0	1				Pend. APBD Kabupaten/Kota
4	1	5	0	2				Pend. APBD Provinsi
4	1	5	0	3				Pendapatan APBN
4	1	6	0	0			Penysu. Pend. Klaim	
4	1	6	0	1				Penyesuaian Pendapatan Klaim
4	2	1	0	0		Pend. Non Operasional		
4	2	1	0	0			Pend. Non Operasional	
4	2	1	0	1				Keuntungan Pen/Kel/Peng Aset Tetap
4	2	1	0	2				Keuntungan Peng/Kel/Peng Persediaan
4	2	2	0	0			Pend. Non Op.Lainnya	

4	2	2	0	1				Pendapatan Non Operasional Lainnya
5	0	0	0	0	Beban			
5	1	0	0	0		B. Op. Kegiatan Pelayn		
5	1	1	0	0			Beban Pegawai Pelayn	
5	1	1	0	1				Beban Gaji dan Tunjangan PL
5	1	1	0	2				Beban Tambahan Penghasilan PNS PL
5	1	1	0	3				Beban Honorarium PL
5	1	2	0	0			Beban Bahan	
5	1	2	0	1				Beban Obat-obatan PL
5	1	2	0	2				Beban Bahan Kimia PL
5	1	2	0	3				Beban Alat Kesehatan Pakai Habis PL
5	1	2	0	4				Beban Makan Minum Pasien
5	1	2	0	5				Beban Pengisian Tabung Gas PL
5	1	3	0	0			Beban Pempl. Pelayn	
5	1	3	0	1				Beban Pempl Ged & Bang PL
5	1	3	0	2				Beban Pempl Perlt dan Mes PL
5	1	3	0	3				Beban Pempl Jalan, Irigasi, Inst, Jar PL
5	1	4	0	0			Beban Brg dan Jasa PL	
5	1	4	0	1				Beban Telepon/Faksimili PL
5	1	4	0	2				Beban Air PL
5	1	4	0	3				Beban Listrik PL
5	1	4	0	4				Beban Perlt dan Perlng Olhrga PH PL
5	1	4	0	5				Beban Brg Prakt dan Perconthn PL
5	1	4	0	6				Beban Sertifikasi dan Kalibrasi PL
5	1	4	0	7				Beban Jasa Perijinan dan Adm PL
5	1	4	0	8				Beban Jasa Uji Laboratorium PL
5	1	4	0	9				Beban Jasa Pemrk. Pasien Rujukan
5	1	4	1	0				Beban Jasa Cleaning Service PL

5	1	4	1	1				Beban Pemeriksaan. Kes dan Pengobatan PL
5	1	4	1	2				Beban Bahan Makanan/Sembako PL
5	1	4	1	3				Beban Pakaian Khusus PL
5	1	4	1	4				Beban Perjalanan Dinas
5	2	0	0	0		B.Op Kegiatan UA		
5	2	1	0	0			B. Pegawai UA	
5	2	1	0	1				Beban Gaji dan Tunjangan UA
5	2	1	0	2				Beban Tambahan Pengh PNS UA
5	2	1	0	3				Beban Honorarium UA
5	2	1	0	4				Beban Uang Lembur UA
5	2	2	0	0			B. Adm Kantor	
5	2	2	0	1				Beban Iuran Keanggotan UA
5	2	2	0	2				Beban Perjalanan Dinas UA
5	2	2	0	3				Keuntungan Penghapusan Aset Tetap
5	2	3	0	0			Beban Promosi	
5	2	3	0	1				Beban Jasa Dok dan Publikasi UA
5	2	4	0	0			B. Pemeliharaan UA	
5	2	4	0	1				B. Alat Tulis Kantor UA
5	2	4	0	2				B. Cenderamata/Souvenir UA
5	2	4	0	3				B. Pembelian Buku Cek UA
5	2	4	0	4				B. Surat Kabar/Majalah UA
5	2	4	0	5				B. Jasa Paket dan Pengiriman UA
5	2	4	0	6				B. Jasa Perijinan dan Adm UA
5	2	4	0	7				B. Jasa Dok dan Publikasi UA
5	2	4	0	8				B. Cetak dan/atau Penggandaan UA
5	2	4	0	9				B. Makan dan Minum Rapat/Keg UA
5	2	4	1	0				B. Alat Listrik dan Elektronik UA
5	2	4	1	1				B. BBM/Gas/Pelumas Alat Op UA

5	2	4	1	2				B. Pengisian Tabung Gas UA
5	2	4	1	3				B. Perlit dan Perl RT Pakai Habis UA
5	2	4	1	4				B. Benda Pos UA
5	2	4	1	5				B. Bahan Baku Bangunan UA
5	2	4	1	6				B. Telepon/Faksimili UA
5	2	4	1	7				B. Air UA
5	2	4	1	8				B. Service Kendaraan Bermotor UA
5	2	4	1	9				B. Jasa Narasumber/Tenaga Ahli UA
5	2	4	2	0				B. Pakaian Kerja Lapangan UA
5	2	4	2	1				B. Pakaian Khusus UA
5	2	4	2	2				B. Kurs Singkat/Pelt/Bim Teknik UA
5	2	4	2	3				B. Jasa Konsultasi UA
5	2	4	2	4				B. Jasa Dekorasi UA
5	2	4	2	5				B. Jasa Cleaning Service UA
5	2	4	2	6				B. Jasa Laundry UA
5	2	4	2	7				B. Pengelolaan Sampah UA
5	2	4	2	8				B. Sewa Gedung/Kantor/Tempat UA
5	2	4	2	9				B. Jasa Konsultasi Hukum UA
5	2	4	3	0				B. Perlit dan Perl Op Pakai Habis UA
5	2	4	3	1				B. Premi Asuransi
5	2	4	3	2				B. Makanan dan Minuman Tamu
5	2	4	3	3				B. Bahan Makanan/Sembako UA
5	2	4	3	4				B. Jasa Konsultasi Penelitian UA
5	2	4	3	5				B. Sewa Barang Bercorak Kebud UA
5	2	5	0	0			B. UA Lainnya	
5	2	5	0	1				B. Penyst Aset Tetap
5	2	5	0	2				B. Penyst Aset Lain-lain
5	2	5	0	3				B. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

5	2	5	0	4				B. Operasional Lain-lain
5	3	0	0	0		B. Non Operasional		
5	3	1	0	0			B. Adm Trans Keu	
5	3	2	0	0			Beban Bunga	
5	3	3	0	0			B. Adm dan Pengl Piu	
5	3	4	0	0			B. Penysh Piutang	
5	3	5	0	0			B. Ker/Pen/Pengh Pers	
5	3	6	0	0			B. Ker/Pen/Peng Aset	

Lampiran 2. Jurnal Akuntansi

A. Aset Lancar

Kas dan Setara Kas			
Transaksi	Jurnal	Debit	Kredit
Pengeluaran kas untuk gaji dan tunjangan pegawai	Beban Gaji Pokok Tunjangan A Tunjangan B Tunjangan C Kas	xxx xxx xxx xxx	xxx
Pengeluaran kas untuk pembayaran beban	Beban Perjalanan Dinas PL Kas	xxx	xxx
Penerimaan kas dengan valuta asing sebagai alat pembayaran	Kas Pendapatan Pelayanan Medik (ditambah keterangan kurs mata uang asing terhadap rupiah yang berlaku saat itu)	xxx	xxx

Piutang			
Ketika terjadi piutang dari pemanfaatan aset	Piutang Pendapatan Hasil Pemanfaatan Aset BLUD Pendapatan Hasil Pemanfaatan BLUD	xxx	xxx
Mencatat penerimaan pembayaran piutang	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan Hasil Pemanfaatan Aset BLUD	xxx	xxx
Ketika terjadi piutang atas pendapatan jasa layanan	Piutang Pendapatan Jasa Layanan BLUD Pendapatan Rawat Inap	xxx	xxx
Ketika terjadi piutang atas pendapatan jasa layanan (BPJS)	Piutang Pendapatan Jasa Layanan (BPJS) Pendapatan Rawat Inap	xxx	xxx
Mencatat penerimaan pembayaran piutang pasien umum	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan Jasa Layanan BLUD	xxx	xxx
Mencatat penerimaan pembayaran piutang pasien BPJS	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan Jasa Layanan BLUD (BPJS)	xxx	xxx
Penghapusan piutang ketika terjadi piutang tak tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Pasien Umum/BPJS	xxx	xxx
Mencatat estimasi piutang tak tertagih	Beban Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx	xxx
Mencatat penerimaan pembayaran atas piutang tak tertagih yang sudah dihapus	Piutang Pasien Umum/BPJS Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx	xxx
	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pasien Umum/BPJS	xxx	xxx
Persediaan			
Pembelian persediaan dibayar dengan uang muka (ketika barang diterima)	Persediaan A Uang Muka Utang Usaha	xxx	xxx xxx
Pembelian persediaan dengan uang muka	Uang Muka-Persediaan A Kas	xxx	xxx
Mencatat penjualan persediaan	Kas/Piutang Penjualan Persediaan	xxx	xxx

	Harga Pokok Penjualan Persediaan Persediaan	xxx	xxx
Ketika terjadi retur penjualan persediaan	Piutang Usaha Persediaan A	xxx	xxx
Mencatat penurunan nilai persediaan	Beban Kerugian penurunan/kehilangan/penghapusan persediaan Akm Kerugian penurunan/kehilangan/penghapusan persd	xxx	xxx

B. Aset Tetap

Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan menjadi uang muka	Konstruksi dalam Pengerjaan Uang Muka	xxx	xxx
Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset tetap	Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Mencatat usulan penghapusan aset tetap	Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	xxx xxx	xxx xxx
Ketika sudah ditetapkan SK penghapusan/penjualan aset tetap	Piutang Penghapusan/Penjualan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Aset Lain-lain	xxx xxx	xxx
Penghapusan/penjualan aset tetap	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Penghapusan/Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
Pembelian aset tetap tunai	Alat-alat Kedokteran Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Penyusutan aset tetap	Beban Penyusutan – Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx

C. Investasi Jangka Pendek

Menyerahkan kas untuk didepositokan ke bank	Kas di Bank Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
---	--	-----	-----

Penerimaan bunga deposito	Kas di Bank Bunga Deposito Pendapatan Bunga	xxx	xxx xxx
Penarikan deposito sebelum jangka waktu yang ditentukan	Kas di Bendahara Penerimaan Penalty atas Deposito Kas di Bank	xxx xxx	xxx
Penarikan deposito sesuai jangka waktu yang ditentukan	Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bank	xxx	xxx

D. Aset Tidak Berwujud

Mencatat perolehan aset tidak berwujud	Aset Tidak Berwujud Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
Ketika aset tidak berwujud telah habis masanya	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx

E. Utang Jangka Pendek

Mencatat ketika terjadi utang	Komputer Utang Usaha – Komputer	xxx	xxx
Mencatat ketika pelunasan utang	Utang Usaha – Komputer Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx

F. Utang Jangka Panjang

Mencatat ketika terjadi utang	Kas di Bendahara Penerimaan Utang Bank Biaya Administrasi Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx xxx	xxx xxx
Mencatat ketika terjadi pelunasan utang	Utang Bank Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx

Mencatat ketika terjadi pembayaran yang dilakukan secara mengangsur	Utang Bank Beban Bunga Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx xxx	xxx
---	---	------------	-----

G. Pendapatan Diterima Dimuka

Ketika menerima pendapatan diterima dimuka	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
--	---	-----	-----

H. Pendapatan

Mencatat pendapatan yang masih harus diterima	Piutang Pendapatan Jasa Layanan BLUD Pendapatan Rawat Inap	xxx	xxx
Mencatat pendapatan yang diterima tunai	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan UGD	xxx	xxx
Mencatat pendapatan dari penjualan persediaan	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Farmasi	xxx	xxx
Mencatat pendapatan hibah berupa uang	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Mencatat pendapatan hibah berupa barang	Gedung dan Bangunan Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Mencatat pendapatan atas klaim	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan Jasa Layanan BLUD	xxx	xxx
Mencatat penyesuaian pendapatan klaim ketika hasil verifikasi lebih besar dari nilai pengajuan rumah sakit	Piutang Pendapatan Jasa Layanan BLUD Penyesuaian Pendapatan Klaim	xxx	xxx
Mencatat penyesuaian pendapatan klaim ketika hasil verifikasi lebih kecil dari nilai pengajuan rumah sakit	Penyesuaian Pendapatan Klaim Piutang Pendapatan Jasa Layanan BLUD	xxx	xxx

J. Beban

Mencatat beban untuk pegawai	Beban Gaji dan Tunjangan Beban Tambahan Penghasilan PNS Beban Uang Lembur Kas	xxx xxx xxx	xxx
Mencatat beban untuk administrasi dan umum	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Kas	xxx	xxx

